



Toolkit Pelokalan dan Pedoman Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan





Toolkit Pelokalan dan Pedoman Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

**ASEAN (ACW, ACWC, ASEAN WPS Advisory Group),
UN Women**

Sekretariat ASEAN

A decorative graphic at the bottom of the page features three overlapping, curved bands in blue, yellow, and red, sweeping across the width of the page.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara Anggotanya meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, harap untuk menghubungi:

Sekretariat ASEAN

Community Relations Division (CRD)

70A Jalan Sisingamangaraja

Jakarta 12110

Indonesia

Telepon: (62 21) 724-3372, 726-2991

Fax: (62 21) 739-8234, 724-3504

E-mail: public@asean.org

Data Katalog dalam Publikasi

Toolkit Pelokalan dan Pedoman Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan Jakarta, Sekretariat ASEAN, Desember 2023

ISBN 978-623-5429-33-5 (PDF)



ASEAN: A Community of Opportunities for All

Teks publikasi ini boleh dikutip atau dicetak ulang secara bebas, asalkan pengakuan yang sesuai diberikan dan salinan yang berisi materi yang dicetak ulang dikirimkan ke Community Relations Division (CRD) Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Informasi umum mengenai ASEAN bisa dilihat secara online di Website ASEAN: www.asean.org

Hak Cipta Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2023.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Publikasi ini didukung oleh

:



UN Women menugaskan adanya publikasi ini di bawah proyek regional, “Memberdayakan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Mencegah Kekerasan dan Mempromosikan Kohesi Sosial di ASEAN”, dengan dukungan penuh dari pemerintah Kanada, Republik Korea, dan Inggris. Sharmistha Dasbarwa dan Mirsad Jacevic, konsultan independen, menyusun dokumen tersebut, yang bertujuan untuk memfasilitasi implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Negara-negara Anggota ASEAN. Pembangunan dipimpin oleh Komite Perwakilan Perempuan ASEAN dari Kamboja, Ketua ASEAN Advisory Group untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.

Publikasi ini menyajikan toolkit dan pedoman yang dihasilkan melalui konsultasi dengan perwakilan badan-badan sektoral ASEAN, yaitu Komite ASEAN untuk Perempuan, Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak ASEAN, dan ASEAN Women, Peace and Security Advisory Group, yang terdiri dari 11 entitas sektoral di tiga pilar komunitas. Selain itu, informasi relevan dikumpulkan dari survei terhadap perwakilan Komite ASEAN Perempuan. Informasi tersebut melengkapi tinjauan dan analisis literatur sekunder yang luas.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan kebijakan resmi UN Women, PBB atau Organisasi afiliasinya, ataupun pemerintah Kanada, Republik Korea atau Inggris. Penunjukan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak mewakili ekspresi pendapat apa pun dari pihak UN Women mengenai status hukum negara, teritori, kota atau wilayah mana pun, atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas-batas atau perbatasannya.



Daftar Isi

Kata Pengantar	6
Ringkasan Eksekutif	8
Tentang toolkit dan pedoman ini	9
Pendahuluan	9
Definisi pelokalan	10
Tujuan dan struktur toolkit	10
Tinjauan singkat mengenai agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan	11
Kerangka global	11
Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan	13
Berbagai opsi untuk menyusun rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan	14
Model rencana aksi nasional	16
Langkah 1 Merencanakan rencana aksi nasional	17
1. Menetapkan struktur untuk mengawasi koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan	17
2. Meningkatkan kesadaran, sensitivitas pemangku kepentingan utama mengenai tanggung jawab mereka dan membangun rasa kepemilikan	17
3. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama	18
4. Melakukan analisis situasi	20
5. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan	21
6. Membangun platform konsultatif dan inklusif yang terdiri dari para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang untuk berbagi informasi secara reguler dan transparansi	22
7. Memfasilitasi partisipasi yang bermakna dari masyarakat sipil dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi nasional	26
8. Mengidentifikasi bidang utama penyelarasan antara kebijakan yang ada, kerangka kerja regional dan global, serta rencana aksi nasional	28
9. Memilih aksi prioritas yang dipandu oleh komponen utama dari rencana aksi nasional berdampak tinggi	29
10. Memastikan transparansi dan akuntabilitas	32
Langkah 2 Menyusun rencana aksi nasional	33
1. Membentuk komite atau gugus tugas untuk mulai menyusun rencana aksi nasional	33
2. Menyusun rencana nasional yang selaras dengan Rencana Aksi Regional	36
3. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi	41
4. Menyusun mekanisme monitoring dan pelaporan	44
5. Pentingnya memonitor umpan balik dalam proses kebijakan	47
6. Menyediakan sumber daya untuk rencana monitoring dan evaluasi	48
7. Tantangan yang berulang dan solusi efektif dalam monitoring dan pelaporan	48
8. Menyesuaikan kerangka monitoring dan evaluasi yang ada dengan prinsip-prinsip regional	50
9. Biaya dan menyusun anggaran untuk rencana aksi nasional	51
10. Mengidentifikasi sumber pendanaan inovatif	52
Langkah 3 Mengoperasikan Rencana Aksi Nasional (RAN)	54
1. Mengesahkan rancangan rencana aksi nasional, mengadopsi, dan meluncurkannya	54
2. Meningkatkan kesadaran pentingnya RAN, menguatkan komitmen pemerintah dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan utama	55
3. Mendokumentasikan praktik-praktik baik dan pembelajaran yang dipetik	57
Glosarium	59
Referensi	62

Kata Pengantar

Menjelang peringatan dua puluh lima tahun DK PBB 1325 dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan manusia yang meluas, inilah momen yang tepat tidak hanya untuk memperingati tetapi juga untuk menyusun strategi tentang cara terbaik untuk memperkuat peran penting aktor-aktor nasional dan daerah yang merupakan pihak pertama yang merespons ketika tantangan keamanan itu muncul. Meskipun peran mereka penting dalam konteks perdamaian dan keamanan, kontribusi mereka belum sepenuhnya diakui.

Dalam hal ini, penting untuk mengakui bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk organisasi masyarakat sipil nasional dan entitas lainnya semakin memainkan peran penting dalam pencegahan dan respons terhadap ancaman keamanan manusia yang muncul. Oleh karena itu, melokalkan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) merupakan pengakuan atas kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah serta kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak dan mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menghadapi tantangan keamanan di masa yang akan datang.

Sejak peluncuran DK PBB 1325 pada tahun 2000, Dewan Keamanan PBB telah menyerukan kepada Negara-negara Anggota untuk mengembangkan rencana nasional guna memajukan agenda WPS dan mengembangkan kegiatan yang ditargetkan yang berfokus pada negara, lokasi, konteks spesifik, dan strategi-strategi respons. Pelokalan WPS memang merupakan salah satu dari empat rekomendasi utama Kajian Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Kebutuhan untuk meningkatkan pelokalan agenda WPS di antara Negara-negara Anggota ASEAN ditekankan untuk 'meningkatkan arsitektur perdamaian dan keamanan kawasan' dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam salah satu Aksi Prioritas dari Rencana Aksi Regional ASEAN mengenai WPS khususnya untuk mewujudkan partisipasi bermakna perempuan dalam proses pengambilan keputusan tentang perdamaian dan keamanan.

Dengan latar belakang ini, pengembangan pelokalan toolkit ini memberikan sumber daya yang sangat berharga bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk memilih dan memprioritaskan opsi-opsi yang tersedia untuk mengatasi tantangan keamanan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan toolkit pelokalan tersebut juga memberikan peluang yang tepat untuk mengembangkan peta jalan penerapan aksi transformatif yang selaras dengan kegiatan-kegiatan kunci dari Regional Plan of Action on Women, Peace, and Security (RPA WPS atau Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan).

Toolkit ini akan menjadi aset penting tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi aktor-aktor masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dari berbagai latar belakang karena kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi didasarkan pada upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang melalui proses yang inklusif dan partisipatif.

Oleh karena itu, operasionalisasi pelokalan rencana di tingkat nasional dan daerah merupakan ujian penentu bagi para pemangku kepentingan utama, khususnya pemerintah pusat. Perencanaan dan penganggaran program/proyek WPS dari perspektif gender, serta pelacakan dampaknya merupakan langkah yang signifikan. Pada saat yang sama, jika diimplementasikan secara efektif, hal ini akan menjamin adanya sinergi antara ASEAN RPA WPS dan prioritas nasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di semua tingkatan.

Saya ingin menyampaikan penghargaan tulus saya kepada Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW) atas komitmen teguh mereka untuk memajukan agenda WPS dan kepada UN Women atas kemitraan jangka panjang.

Saya mendorong pemanfaatan toolkit dan pedoman ini secara efektif untuk mendukung implementasi kebijakan nasional mengenai perdamaian dan keamanan dan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan karena merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menumbuhkan lingkungan yang mendukung dan aman yang memperkuat upaya yang dipimpin perempuan menuju masa depan yang damai.

H.E. ING Kantha Phavi, M.D.



Menteri

Kementerian Urusan

Perempuan Kerajaan Kamboja



Ringkasan Eksekutif

Asia Tenggara memiliki sejarah panjang dalam pendekatan nasional dan daerah yang inovatif terhadap perdamaian dan keamanan, yang sering kali dipimpin oleh perempuan. Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang diluncurkan pada tahun 2022, dibangun berdasarkan konsolidasi upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan di kawasan ini mengenai isu-isu terkait perempuan, perdamaian dan keamanan, dan menekankan kebutuhan untuk “mengembangkan pedoman untuk mendukung otoritas lokal dan mitra pelaksana di tingkat nasional dan daerah...sehubungan dengan implementasi dan monitoring dan evaluasi rencana tersebut”. Hal ini memerlukan penguatan peran katalitik pemerintah nasional dalam memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling terkena dampak dan termarginalisasi, terutama perempuan, memberikan informasi dan membentuk pencegahan konflik dan perdamaian yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, konsep keamanan yang berkembang dari fokus utama pada Negara menjadi konsep yang mencakup keamanan manusia di masyarakat luas memerlukan kerangka kerja yang multidimensi dan berpusat pada manusia.

Hanya pendekatan ini yang dapat menghadapi berbagai tantangan mulai dari ekstremisme kekerasan hingga perpindahan paksa, dampak perubahan iklim, perdagangan manusia, dan kekerasan berbasis gender, serta banyak ancaman keamanan non-tradisional lainnya.¹ Hal-hal ini terus menimbulkan tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan dan inklusi perempuan dalam konteks perdamaian dan keamanan di wilayah yang beragam.²

Dengan latar belakang ini, toolkit dan pedoman pelokalan ini memberikan panduan teknis tentang “cara” memfasilitasi implementasi Rencana Aksi Regional dengan mengadaptasi ketentuan-ketentuan utama dalam konteks nasional. Bagian pertama menjelaskan toolkit dan pedoman serta mendefinisikan pelokalan. Bagian kedua menyajikan tinjauan singkat mengenai kebijakan dan kerangka kerja global dan regional yang relevan dengan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan.

Bagian ketiga menyajikan pendekatan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Regional. Tergantung pada konteksnya, negara-negara anggota ASEAN dapat memilih pendekatan implementasi yang berbeda. Beberapa negara mungkin mengintegrasikan isu-isu perempuan, perdamaian dan keamanan ke dalam undang-undang, kebijakan dan rencana yang ada, termasuk rencana pembangunan nasional secara keseluruhan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Negara-negara lain mungkin memilih untuk mengembangkan rencana aksi nasional tersendiri tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Toolkit dan pedoman ini menyajikan pro dan kontra dari kedua pendekatan tersebut dan menguraikan langkah-langkah penting untuk mengembangkan rencana aksi nasional, termasuk tahap perencanaan, penyusunan, dan Operasionalisasi. Beberapa langkah penting meliputi: peningkatan kesadaran dan sensitivitas para pemangku kepentingan utama; analisis situasi dan pemetaan pemangku kepentingan; penyelarasan rencana aksi nasional dengan kebijakan nasional, Rencana Aksi Regional dan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan melalui pemilihan prioritas bidang aksi; dan langkah-langkah untuk memastikan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam tataran tinggi. Langkah-langkah ini diikuti dengan penyusunan rencana aksi nasional, yang mencakup monitoring dan evaluasi serta penetapan biaya dan penyiapan komponen anggaran. Rencana tersebut kemudian disahkan, diadopsi dan diluncurkan, dan implementasi awal dimulai. Dokumentasi praktik-praktik dan pembelajaran yang menjanjikan akan memperkaya pembelajaran dan memberi masukan bagi praktik-praktik di masa depan.

Toolkit dan pedoman ini menawarkan dukungan langkah demi langkah yang mudah digunakan bagi negara-negara anggota ASEAN dan beragam pemangku kepentingan lainnya seperti otoritas nasional dan lokal, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan pihak lainnya untuk memastikan bahwa rencana aksi nasional terhadap perempuan, perdamaian, dan keamanan memiliki kepemilikan yang luas dan menjalin kolaborasi lintas sektoral sebagai landasan bagi implementasi yang efektif.

Tentang toolkit dan pedoman ini

Pendahuluan

Dewan Keamanan PBB meluncurkan agenda bersejarah perempuan, perdamaian dan keamanan dengan diadopsinya resolusi 1325 pada tanggal 31 Oktober 2000. Perjanjian ini menegaskan kembali pentingnya peran perempuan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik serta dalam pembangunan perdamaian (peacebuilding), dan menekankan partisipasi setara perempuan dalam semua upaya untuk memelihara dan memajukan perdamaian dan keamanan. Dewan Keamanan kemudian mengadopsi sembilan resolusi tambahan tentang perempuan, perdamaian dan keamanan.³ Kesembilan resolusi tambahan ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai aspek-aspek spesifik perang dan dampaknya terhadap perempuan sekaligus menangani isu-isu seperti kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, perdagangan manusia, dan dimensi pemeliharaan perdamaian yang bersifat gender. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, semua Negara Anggota PBB “setuju untuk melaksanakan dan menerima keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini”, yang menggarisbawahi sifat mengikat dari resolusi tersebut.

Di kawasan ASEAN, konteks perdamaian dan keamanan telah berubah dengan cepat, bersinggungan dengan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender struktural yang berdampak pada hak dan pemberdayaan perempuan.⁴ Baru-baru ini, kurangnya integrasi perspektif gender dalam merespons tantangan keamanan dan krisis COVID-19 telah memperparah ketidaksetaraan gender.⁵ Kekhawatiran baru dan yang masih muncul memerlukan strategi nasional dan spesifik lokasi yang mampu merespons tantangan-tantangan yang sering kali belum pernah terjadi sebelumnya dan mengarah pada perdamaian abadi.⁶

Setiap negara harus menemukan cara untuk mengimplementasikan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan yang paling tepat dan relevan dengan konteksnya. Sebagian besar negara telah berupaya secara positif untuk mengintegrasikan isu-isu ini ke dalam undang-undang, kebijakan, dan rencana perdamaian dan keamanan yang ada, termasuk rencana pembangunan nasional untuk memungkinkan implementasi yang komprehensif dalam jangka panjang.⁷

Toolkit dan pedoman ini memberikan panduan teknis kepada para aktor nasional yang bertugas mengimplementasikan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan tersebut. Para aktor nasional tersebut mendukung upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam menghadapi ancaman keamanan yang muncul dan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan dengan hubungan yang kuat dengan kerangka regional dan global. Rencana aksi nasional memberikan peluang unik untuk memperdalam keterlibatan dan mencapai perubahan transformatif sehingga perempuan dan anak perempuan dapat mengambil peran yang tepat sebagai aktor utama perdamaian dan keamanan di tingkat nasional, regional, dan internasional.⁸

Toolkit ini menekankan cara mengimplementasikan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan di tingkat nasional. Toolkit ini dapat memberikan peluang unik bagi perempuan dan kelompok rentan untuk terlibat secara aktif dan memimpin proses berdasarkan pemahaman mendalam mereka tentang tantangan dan peluang lokal.

Toolkit ini juga mendukung negara-negara anggota ASEAN agar berhasil mengimplementasikan kerangka kebijakan global dan regional, termasuk resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Sebagaimana dijamin, elemen-elemen kunci dari resolusi-resolusi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam rencana kementerian nasional dengan portofolio antara lain mengenai pembangunan ekonomi dan sosial, pertahanan, urusan luar negeri, gender, urusan dalam negeri, dan keadilan. Mengembangkan rencana aksi nasional yang didedikasikan untuk perempuan, perdamaian, dan keamanan merupakan salah satu metode implementasinya. Yang terpenting, rencana aksi nasional tersebut dapat memicu alokasi anggaran untuk memajukan kebijakan, rencana, dan program.⁹

Definisi Pelokalan

Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan mencakup serangkaian aksi prioritas, peluang, dan tantangan komprehensif yang terkait dengan konteks nasional. Implementasi aksi prioritas yang efektif memerlukan intervensi yang merespons prioritas masyarakat dan mendukung kepemimpinan nasional.¹⁰

Toolkit ini mendukung pelokalan dan implementasi Rencana Regional dalam konteks negara-negara anggota ASEAN yang beragam. Toolkit ini mendefinisikan tujuan pelokalan secara keseluruhan, dalam konteks isu perdamaian dan keamanan, untuk implementasi yang lebih baik dari 10 resolusi Dewan Keamanan tentang agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan di tingkat lokal, nasional, regional, dan global, terutama dengan memperkuat peran penting ASEAN dan kepemilikan ASEAN dalam pelokalan Rencana Aksi Regional. Tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai resolusi tersebut di kalangan otoritas pemerintah, pemimpin adat, pemimpin perempuan, pemimpin pemuda, anggota masyarakat dan konstituen mereka masing-masing, dan untuk membantu mengidentifikasi serta merespons prioritas nasional.

Pelokalan didefinisikan sebagai kegiatan mempromosikan kepemimpinan nasional, kepemilikan dan komitmen terhadap implementasi agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan di antara para aktor utama nasional. Pelokalan meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk memastikan akuntabilitas para pemimpin nasional dan otoritas pemerintah, organisasi regional, PBB, donor, dan mitra pembangunan lainnya atas kewajiban mereka yang diamanatkan dalam resolusi Dewan Keamanan dan kerangka kerja regional masing-masing, dalam hal ini, Rencana Aksi Regional ASEAN. Instrumen hukum dan kebijakan konkret yang memperkuat implementasi nasional merupakan elemen penting, di samping koordinasi sistematis dan kerja sama lintas sektoral di antara para pemangku kepentingan.¹¹

Tujuan dan struktur toolkit

Toolkit ini menekankan bagaimana hubungan antara prioritas nasional dan aksi prioritas dalam Rencana Aksi Regional dapat dibangun. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat upaya para pemangku kepentingan nasional utama di negara-negara anggota ASEAN untuk memilih, menghubungkan, dan mengimplementasikan langkah-langkah yang sesuai dengan prioritas nasional,¹² sejalan dengan berbagai ancaman keamanan manusia yang terus berkembang.

Tujuan sekunder dari toolkit ini adalah untuk merekomendasikan peta jalan praktis untuk mengidentifikasi proses-proses utama dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk mentransformasi aksi prioritas yang dipilih menjadi inisiatif nasional yang didorong oleh permintaan. Proses yang teridentifikasi harus dilengkapi dengan koordinasi yang efisien, rencana mobilisasi sumber daya dan kerangka monitoring dan evaluasi yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.¹³

Toolkit ini mencakup:

- Pendahuluan dengan definisi kerja pelokalan dan tujuan yang sesuai dengan toolkit ini, hasil kerja Komite ASEAN untuk Perempuan dan konteks ASEAN
- Tinjauan singkat mengenai kebijakan global dan regional serta kerangka hukum agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan
- Penjelasan mengenai langkah-langkah kunci untuk mengembangkan rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, yang mencakup berbagai model, pencapaian, dan pembelajaran, serta dasar-dasar perencanaan, penyusunan, dan pengoperasian rencana serta monitoring dan evaluasi

Tinjauan singkat mengenai agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan

Kerangka global

Lima tahun setelah Konferensi Dunia tentang Perempuan Keempat tahun 1995 di Beijing, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 1325. Untuk pertama kalinya, resolusi ini menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk mengarusutamakan gender di semua lembaga dan kegiatan terkait perdamaian dan keamanan, memastikan lembaga-lembaga tersebut merespons kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda, dan mempertimbangkan dampak intervensi yang berbasis gender. Resolusi 1325 juga menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual.¹⁴

Resolusi 1325 dan sembilan resolusi terkait lainnya selama dua dekade terakhir mencakup agenda perempuan, perdamaian dan keamanan (lihat Tabel 1 untuk ketentuan-ketentuan utama). Kewajiban dalam agenda ini mencakup tingkat nasional hingga internasional. Kewajiban tersebut mencakup tindakan spesifik untuk mengakui dan melindungi hak-hak semua perempuan dan anak perempuan, dan memastikan inklusivitas di lembaga dan operasi perdamaian dan keamanan, termasuk selama pemberian bantuan dan pemulihan. Resolusi-resolusi tersebut juga menyerukan kepada semua pihak untuk mengatasi kebutuhan akan akses perempuan terhadap kesehatan dan layanan yang lebih luas, seperti peluang ekonomi, partisipasi dalam posisi kepemimpinan dan berbagai isu yang berkaitan dengan implementasi agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan.

Selain 10 resolusi inti perempuan, perdamaian, dan keamanan, resolusi Dewan Keamanan lainnya yang menangani isu-isu terkait antara lain adalah resolusi 2538 tentang gender dan pemeliharaan perdamaian, yang diperkenalkan oleh Indonesia dan disahkan pada tahun 2000.¹⁵

Tabel 1: Ketentuan utama dari 10 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan

Tahun resolusi	Isu utama dan ketentuan inti
S/RES/1325 (2000)	Keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam tata kelola perdamaian dan keamanan; perlindungan hak-hak dan tubuh perempuan dalam situasi konflik dan pascakonflik.
S/RES/1820 (2008)	Perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam konflik; tidak ada toleransi terhadap pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh personel Operasi Penjaga Perdamaian Departemen PBB.
S/RES/1888 (2009)	Pembentukan kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Bidang Kekerasan Seksual dalam Konflik; pembentukan inisiatif antar-lembaga, "Aksi PBB Melawan Kekerasan Seksual dalam Konflik"; identifikasi "tim ahli"; penunjukan penasihat perlindungan perempuan untuk misi lapangan.
S/RES/1889 (2009)	Perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam tata kelola perdamaian dan keamanan di semua tingkatan; pembuatan indikator global untuk memetakan implementasi resolusi 1325

Bersambung ▼

Tahun resolusi	Isu utama dan ketentuan inti
S/RES/1960 (2010)	Pengembangan pengaturan monitoring, analisis dan pelaporan terkait kekerasan seksual dalam konflik; integrasi penasihat perdamaian perempuan dalam misi lapangan bersama dengan penasihat gender.
S/RES/2106 (2013)	Menantang impunitas dan kurangnya akuntabilitas atas kekerasan seksual dalam konflik.
S/RES/2122 (2013)	Mengidentifikasi UN Women sebagai entitas utama PBB yang memberikan informasi dan nasihat mengenai partisipasi perempuan dalam tata kelola perdamaian dan keamanan; akuntabilitas PBB secara keseluruhan; inklusi masyarakat sipil; tinjauan tingkat tinggi tahun 2015 atas implementasi resolusi 1325.
S/RES/2242 (2015)	Mengintegrasikan perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam semua proses negara Dewan Keamanan; membentuk Kelompok Pakar Informal Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan; menambahkan pertimbangan perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam pertimbangan komite sanksi; menghubungkan perempuan, perdamaian, dan keamanan dengan pencegahan terorisme dan ekstremisme.
S/RES/2467 (2019)	Memperkuat penuntutan/hukuman atas kekerasan seksual dalam konflik; membuka kemungkinan pemberian sanksi terhadap pelaku; menegaskan pendekatan yang berpusat pada penyintas; menyerukan pemulihan bagi para penyintas.
S/RES/2493 (2019)	Menyerukan kepada Negara-negara Anggota PBB untuk mempromosikan hak-hak perempuan; mendorong terciptanya lingkungan operasional yang aman bagi mereka yang bekerja untuk mempromosikan hak-hak perempuan; menyerukan implementasi penuh semua resolusi perempuan, perdamaian, dan keamanan sebelumnya

Sumber: Direproduksi sebagian dari Kirby dan Shepherd, 2016 dan Myrtilinen et al., 2020.

Kerangka kerja global berpengaruh lainnya terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan termasuk Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing. Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing tersebut menyerukan tindakan strategis untuk memahami “dampak konflik bersenjata atau konflik lainnya terhadap perempuan, termasuk mereka yang hidup di bawah pendudukan asing”, dan mengakui kepemimpinan perempuan sebagai “kekuatan mendasar untuk...resolusi konflik dan promosi perdamaian abadi di semua tingkatan.”

Pada tahun 2013, Rekomendasi No. 30 berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) diadopsi, merinci hak-hak perempuan dalam pencegahan konflik, konflik dan rekonstruksi pascakonflik, dan menangani situasi perempuan di seluruh tahapan siklus konflik. Konvensi tersebut mewajibkan negara-negara penandatanganan untuk mengumpulkan data mengenai agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan serta melaporkan kepatuhan terhadap benchmark PBB.

Rekomendasi Umum CEDAW 37, yang disetujui pada tahun 2018, berfokus pada dimensi pengurangan risiko bencana terkait gender dalam konteks perubahan iklim. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 mengakui kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai hal penting dalam perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan, serta mempromosikan perempuan, perdamaian, dan keamanan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengenai kesetaraan gender, pengurangan kesenjangan, serta perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat.¹⁶

Kerangka kerja internasional lain yang relevan adalah resolusi Dewan Keamanan 2250 tentang pemuda, perdamaian, dan keamanan. Resolusi tersebut diadopsi pada tahun 2015 dan menyerukan untuk memastikan bahwa proses perdamaian dan keamanan melibatkan pemuda, termasuk perempuan muda. Upaya yang semakin meningkat adalah untuk memastikan bahwa implementasi agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan bersifat interseksional dan inklusif terhadap perempuan penyandang disabilitas, lansia dan anak muda, serta perempuan dari kelompok yang kurang terwakili dan kelompok terpinggirkan.¹⁷

Semua perkembangan ini secara kumulatif berkontribusi terhadap paradigma keamanan yang responsif gender yang mencerminkan transformasi hubungan sosial.¹⁸

Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

Simposium Regional pertama tentang Implementasi Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang diselenggarakan pada tahun 2019 di Phnom Penh, Kamboja, merekomendasikan dilakukannya studi regional untuk lebih memahami interpretasi perempuan, perdamaian, dan keamanan di seluruh wilayah. Studi ini diterbitkan pada tahun 2021. Salah satu rekomendasi utamanya adalah mengembangkan Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan,¹⁹ yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2022 pada KTT ASEAN yang keempat puluh dan empat puluh satu.

Meskipun tujuan utama Rencana Aksi Regional ASEAN adalah untuk memberikan panduan yang jelas mengenai implementasinya, rencana ini juga memberikan ruang yang cukup untuk merespons prioritas dan realitas perdamaian dan keamanan nasional,²⁰ dan mendukung inovasi nasional. Kepemilikan dan partisipasi nasional dalam intervensi sangatlah penting. Toolkit dan pedoman ini akan mendukung pemangku kepentingan utama di negara-negara anggota ASEAN untuk merancang, menerapkan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi nasional dan lokal melalui proses inklusif yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks.²¹

Berbagai opsi untuk menyusun rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan

Setelah diadopsinya resolusi 1325, Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB menekankan perlunya semua negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip agenda WPS untuk berwujud nyata dan aksi praktis dengan penyusunan rencana aksi nasional. Hal tersebut diharapkan dapat menentukan target dan komitmen konkret untuk memandu kebijakan, lembaga, dan inisiatif dalam dan luar negeri. Pada pertengahan tahun 2023, 107 Negara Anggota telah memiliki rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan.

Rencana aksi nasional merinci aksi yang diambil dan akan dilakukan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban dalam 10 resolusi Dewan Keamanan. Pada tahun 2002, Dewan Keamanan: “mendorong Negara-negara Anggota...dan aktor-aktor relevan lainnya untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi yang jelas dengan tujuan dan jadwal” dan akan “menyusun kegiatan yang ditargetkan yang berfokus pada kendala spesifik yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam situasi pascakonflik”.

Dewan Keamanan memperkuat dukungan ini pada tahun 2004 ketika Dewan Keamanan “menyambut upaya Negara-negara Anggota dalam melaksanakan resolusi 1325 (2000) di tingkat nasional, termasuk penyusunan rencana aksi nasional, dan mendorong Negara-negara Anggota untuk terus mengupayakan implementasi tersebut”. Pada tahun 2005, Dewan Keamanan “menegaskan kembali seruannya kepada Negara-negara Anggota untuk terus mengimplementasikan resolusi 1325 (2000), termasuk melalui pengembangan rencana aksi nasional atau strategi tingkat nasional lainnya”.^{22,23}

Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan yang diadopsi pada tahun 2022 mendorong negara-negara anggota untuk meluncurkan atau menyusun lebih lanjut rencana aksi nasional atau kerangka kebijakan, dan untuk menetapkan peran dan tanggung jawab aktor nasional dan lokal untuk melaksanakan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan.²⁴

Tergantung pada konteks nasionalnya, setiap negara akan menentukan cara terbaik untuk mengimplementasikan agenda tersebut dalam konteks spesifiknya sebagai bagian dari upaya mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Beberapa negara telah mengintegrasikan isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam undang-undang, kebijakan, dan rencana yang ada, yaitu rencana pembangunan nasional (seperti strategi pengentasan kemiskinan) serta strategi keamanan atau pertahanan nasional terkait. Negara-negara lain telah mengadopsi rencana aksi nasional tersendiri melalui proses konsultatif untuk membangkitkan kesadaran dan kepemilikan di antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah yang memainkan peran langsung atau tidak langsung dalam implementasinya.²⁵ Tabel 2 merangkum beberapa keuntungan dan kerugian dari pengintegrasian isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam kebijakan atau rencana yang ada atau mengadopsi pendekatan tersendiri.²⁶

Meskipun terdapat kemajuan, beberapa rencana aksi nasional tidak realistis, kurang memiliki komitmen politik dan sumber daya untuk pelaksanaannya, atau tidak adanya monitoring dan akuntabilitas serta koordinasi yang tidak memadai antar lembaga dan tingkat pemerintahan.²⁸ Toolkit ini memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi beberapa kendala tersebut.

Model rencana aksi nasional

Penerjemahan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam kebijakan nasional sangat bergantung pada konteks nasional. Rencana aksi nasional yang disusun oleh negara-negara donor bersifat berorientasi ke luar dan cenderung berfokus pada kebijakan luar negeri, khususnya hubungan dengan negara-negara yang terkena dampak konflik yang menerima bantuan pembangunan resmi. Negara-negara pascakonflik dan negara-negara yang terkena dampak konflik lebih cenderung menekankan konteks politik dalam negeri. Fokus dari suatu rencana aksi mempunyai beberapa implikasi.

Beberapa negara telah menggabungkan model inward- and outward-looking. Misalnya, rencana generasi pertama dan kedua di Indonesia, yang masing-masing diadopsi pada tahun 2014 dan 2021, menggunakan model campuran ini. Tabel 3 menyajikan beberapa model yang berbeda.²⁹

Tabel 3: Berbagai model rencana aksi nasional

Rencana inward-look	Rencana outward-looking	Pendekatan campuran
Uganda	Kanada	Indonesia, Filipina, Timor-Leste
Sudan	Norwegia	Thailand (langkah-langkah dan pedoman nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan)

Merencanakan rencana aksi nasional

Rencana aksi nasional dirumuskan oleh dan atas nama pemerintah nasional untuk menerjemahkan resolusi internasional dan kerangka kerja regional ke dalam aksi nasional. Meskipun lembaga-lembaga pemerintah biasanya memimpin dalam penyusunan rencana, terdapat ruang yang cukup besar bagi partisipasi organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, sektor swasta, badan-badan regional dan pemangku kepentingan lainnya. Bagian ini merangkum elemen-elemen kunci dari proses perencanaan, dengan menyadari bahwa proses ini harus mencerminkan kondisi negara dan faktor-faktor seperti keragaman dan jumlah pemangku kepentingan; pengaturan regional, nasional atau komunitas yang berbeda; sensitivitas politik dan sumber daya yang tersedia.

1. Menetapkan struktur untuk mengawasi koordinasi, penyusunan, dan implementasi

Suatu struktur atau sekretariat dapat menjadi jangkar dan mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan implementasi rencana aksi nasional. Struktur atau sekretariat tersebut harus dipimpin oleh lembaga pemerintah yang mendapat dukungan penuh dalam mendorong proses dan dapat memastikan bahwa berbagai langkah diselesaikan tepat waktu dan efektif. Anggota staf sekretariat harus dipilih dari berbagai Organisasi yang terlibat dalam implementasi dan mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas. Strukturnya harus disiapkan sebelum kegiatan berikutnya.

2. Meningkatkan kesadaran, sensitivitas pemangku kepentingan utama mengenai tanggung jawab mereka dan membangun rasa kepemilikan

Karena rencana aksi nasional mencerminkan resolusi internasional dan kerangka kerja regional, peningkatan kesadaran merupakan langkah pertama yang penting. Peningkatan kesadaran tersebut meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan, menumbuhkan kemauan politik (political will), mendorong kepemilikan yang luas dan membangun kolaborasi lintas sektoral.³⁰ Strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai latar belakang membantu memastikan bahwa intervensi luas yang melibatkan inisiatif perempuan, perdamaian, dan keamanan dipimpin dan dimiliki oleh mereka sejak awal. Hal ini akan memfasilitasi pembangunan konsensus berdasarkan pemahaman yang baik tentang berbagai kerangka kerja dan relevansinya dengan konteks nasional.

Sesi sosialisasi dan peningkatan kapasitas dengan pejabat penting pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan perusahaan sektor swasta sebelum merumuskan rencana merupakan opsi untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran, mendorong kepemilikan yang luas dan membangun kesepakatan awal mengenai isi dan formulasi rencana serta penentuan prioritas bidang-bidang aksi utama. Hal ini dapat memotivasi kemitraan yang kuat, termasuk antara pemerintah dan para aktor masyarakat sipil. Cara efektif lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan advokasi mencakup kampanye media.³¹

Untuk menjamin kemauan politik, manfaat dari sebuah rencana harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pejabat kunci di kementerian terkait serta para pelaku yang berkepentingan di Organisasi Masyarakat Sipil, akademisi, media, dan lain-lain.³² Proses ini harus berupaya untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih jelas tentang keselarasan antara prioritas nasional dan daerah.

Beberapa permasalahan utama yang perlu disoroti dapat berupa hal-hal berikut:

- Familiarisasi terhadap agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta kerangka kebijakan global dan regional yang ada, dan khususnya alasan mengapa agenda tersebut penting untuk mendorong kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan
- Permasalahan lintas sektoral dan pentingnya koordinasi
- Pembelajaran yang relevan dan praktik terbaik dari negara lain
- Kerangka kebijakan dan undang-undang serta aksi prioritas utama untuk mengatasi tantangan keamanan nasional tradisional dan non-tradisional dari perspektif gender, termasuk perspektif anak perempuan
- Permasalahan kesetaraan gender yang sering terjadi dalam perdamaian dan keamanan, dan cara permasalahan tersebut diatasi
- Sifat arsitektur perempuan, perdamaian, dan keamanan yang terus berkembang di kawasan ASEAN, yang memerlukan pembaruan terus-menerus terhadap isu-isu keamanan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
- Dimasukkannya program-program tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam anggaran pemerintah dan identifikasi sumber-sumber pendanaan yang inovatif

Poin Penting

Peningkatan kesadaran dan advokasi dapat terus berlanjut bahkan setelah rencana aksi nasional dirumuskan. Misalnya, setelah asesmen dilakukan, informasi yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai bahan advokasi dan peningkatan kesadaran. Evaluasi global menemukan bahwa dukungan UN Women terhadap rencana aksi nasional dapat membantu meningkatkan keselarasan dengan kerangka kerja global dan regional yang lebih luas dengan membangun pengetahuan dan komitmen di tingkat negara tentang kerangka normatif dan relevansinya dengan tujuan perempuan, perdamaian, dan keamanan.

3. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama

Perencanaan yang efisien memerlukan kejelasan peran dan tanggung jawab khusus berdasarkan kerangka acuan untuk menyusun, mengkoordinasikan, dan melaksanakan rencana aksi nasional.³³ Komite koordinasi dan penyusunan harus menyiapkan kerangka acuan, mengidentifikasi hubungan dengan kerangka kerja global dan regional serta prioritas nasional. Anggota komite dapat mencakup mitra pembangunan, yang mungkin berperan dalam membangun kapasitas lembaga-lembaga negara dan non-negara. Mereka dapat mendukung mobilisasi pemangku kepentingan dan sumber daya serta pembentukan mekanisme koordinasi.³⁴

Beberapa tugas untuk aktor yang berbeda adalah sebagai berikut.³⁵

- Pejabat pemerintah memastikan hasil yang diinginkan konsisten dengan prioritas keamanan nasional; mendedikasikan sumber daya (finansial, manusia, dan teknis) untuk mendukung implementasi; dan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kemajuan dan dampak

- Organisasi Masyarakat Sipil memberikan masukan yang bermakna dan kontekstual serta mendukung upaya pemerintah melalui advokasi; memperluas jangkauan pemerintah dalam mengkomunikasikan tujuan rencana aksi nasional kepada masyarakat lokal; mitra dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama; dan memonitor serta mengevaluasi kemajuan dan dampak.
- Komunitas internasional memberikan masukan yang bermakna untuk perancangan rencana; mendedikasikan sumber daya (keuangan, manusia, dan teknis) untuk mendukung implementasi; berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan utama; dan berkontribusi dalam monitoring dan evaluasi sehingga para pemimpin di dalam dan di luar pemerintahan dapat saling bertanggung jawab.
- Peran sektor swasta dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks negara tertentu yang mungkin mempunyai minat untuk terlibat dan berkolaborasi dalam mempromosikan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan.

Tabel 4 menyajikan beberapa saran penting untuk memperkuat kepemilikan nasional terhadap rencana aksi nasional.

Tabel 4: Titik masuk utama kepemilikan nasional

Pemangku kepentingan pemerintah	Langkah-langkah dalam persiapan dan implementasi rencana aksi nasional	Saran untuk kepemilikan nasional
<p>Kementerian: urusan gender/ perempuan, dalam negeri, hukum, pembangunan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, dll.</p> <p>Lembaga: penegakan hukum, sektor keamanan, hak asasi manusia, biro statistik, dll.</p>	<p>Perencanaan: dialog dengan pejabat pemerintah dan lembaga publik</p> <p>Analisis pemangku kepentingan Analisis konteks/situasi</p> <p>Pemilihan anggota panitia perumus</p> <p>Pemilihan bidang prioritas Pendanaan/ mobilisasi sumber daya</p> <p>Koordinasi – lembaga yang memimpin dan pengawasan implementasi</p> <p>Monitoring dan evaluasi</p> <p>Dokumentasi praktik-praktik yang menjanjikan dan pembelajaran, serta penyebarannya</p>	<p>Pemangku kepentingan utama pemerintah harus mengambil tanggung jawab untuk menyelaraskan prioritas nasional dengan kerangka internasional dan regional untuk melengkapi pembangunan nasional.</p> <p>Pemilihan pemangku kepentingan pemerintah harus diselesaikan oleh pengambil keputusan di kementerian/lembaga publik terkait.</p> <p>Pejabat pemerintah terpilih dari kementerian/ lembaga harus memimpin audit kelembagaan dan analisis konteks/situasi.</p> <p>Ketua komite perumus haruslah seorang pejabat senior pemerintah yang dapat membuat keputusan dan mempunyai atau dapat menggalang dukungan politik.</p> <p>Ketua komite perumus, bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, harus memimpin pemilihan bidang prioritas dengan berkonsultasi dengan pembuat kebijakan lainnya (administratif dan politik).</p> <p>Aksi prioritas harus dimasukkan dalam anggaran sektoral untuk implementasinya.</p> <p>Pemerintah harus mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan pembangunan yang inovatif, termasuk melalui penganggaran responsif gender.</p> <p>Mekanisme koordinasi harus dipimpin oleh pemerintah (kementerian tertentu) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan yang transparan dan efektif.</p> <p>Badan statistik pemerintah harus bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya untuk mengumpulkan data/informasi berdasarkan kebijakan/rencana pembangunan nasional.</p> <p>Pemilihan praktik-praktik yang menjanjikan dan pelajaran yang dipetik harus melengkapi fokus tujuan pembangunan nasional.</p>

4. Melakukan analisis situasi

Menganalisis lembaga-lembaga nasional dan aktor-aktor pembangunan yang ada akan membantu mengidentifikasi titik masuk untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional, kementerian dan departemen, serta Rencana Aksi Regional. Analisis tersebut mendukung pendekatan terpadu untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional. Analisis tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan, mengidentifikasi prioritas/peluang di masa depan, dan memastikan keberlanjutan kebijakan.

Dua analisis situasi yang berbeda antara lain:³⁶

Audit kelembagaan: asesmen kebijakan-kebijakan yang memandu departemen pemerintah terkait tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia, dan isu-isu terkait.

Asesmen konteks: Asesmen terhadap status perempuan, agenda perdamaian dan keamanan dalam hal partisipasi politik perempuan, ekstremisme kekerasan, perpindahan paksa, dampak perubahan iklim, perdagangan manusia dan kekerasan berbasis gender, serta banyak ancaman keamanan non-tradisional lainnya.

Tabel 5 mengilustrasikan ciri-ciri utama audit kelembagaan dan asesmen konteks.

Tabel 5 mengilustrasikan ciri-ciri utama audit kelembagaan dan asesmen konteks

Jenis analisis situasi	Komitmen	Hukum	Kebijakan	Lembaga
Audit kelembagaan	Apakah ada komitmen formal terhadap agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, misalnya deklarasi atau pernyataan pemimpin politik tingkat tinggi?	Apakah undang-undang nasional sudah memajukan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan?	Kebijakan nasional apa saja yang mendukung agenda tersebut? Apakah ada peluang untuk memasukkan prioritas dan tujuan perempuan, perdamaian, dan keamanan? ke dalam undang-undang nasional dan kebijakan nasional tersebut, jika belum dilakukan?	Lembaga pemerintah manakah yang paling relevan untuk menangani isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan? Apakah lembaga tersebut mempunyai sumber daya keuangan untuk mengimplementasi kan rencana aksi nasional?
	Tantangan	Penyebab kedaruratan	Hambatan utama terhadap partisipasi perempuan dalam isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam konteks nasional	Kontribusi utama perempuan terhadap resolusi konflik dan mempromosikan perdamaian berkelanjutan
Penilaian konteks	Tantangan besar apa yang dapat menghambat kemajuan dalam perencanaan dan berfokus pada perspektif gender serta isu perempuan, perdamaian, dan keamanan?	Apa saja akar penyebab munculnya tantangan keamanan di negara ini, dan apa dampak spesifiknya terhadap perempuan dan anak perempuan?	Apa saja hambatan utama yang menghalangi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan?	Kontribusi penting apa yang diberikan perempuan dalam resolusi konflik dan memelihara perdamaian berkelanjutan?

5. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan

Karena rencana aksi nasional bergantung pada upaya kolektif dari berbagai mitra, penilaian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan akan membantu menentukan cara mereka untuk dapat mendukung rencana tersebut. Beberapa pertanyaan indikatif untuk memetakan peran pemangku kepentingan adalah:³⁷

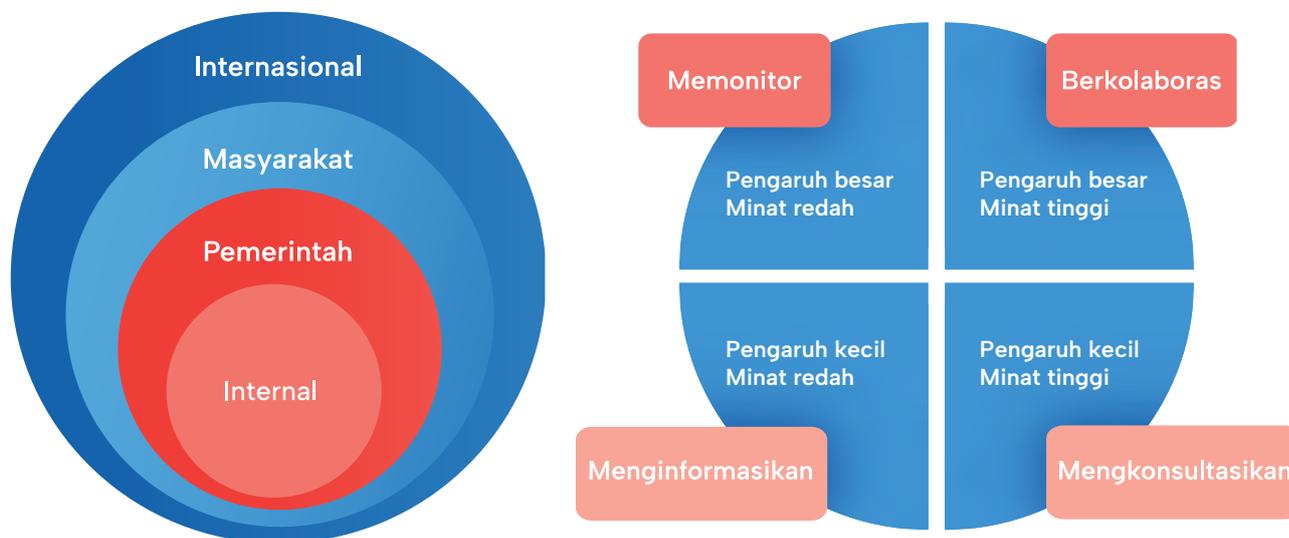
- Seberapa familierkah para pemangku kepentingan utama dengan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan serta rencana aksi nasional?
- Pemangku kepentingan mana saja yang terkena dampak langsung atau terlibat dalam upaya perdamaian dan keamanan? Apa bidang prioritas keterlibatan mereka?
- Pemangku kepentingan mana yang mewakili perempuan dari berbagai latar belakang dan/ atau menerapkan sudut pandang gender dalam menangani isu perdamaian dan keamanan? Bidang-bidang apa saja yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan yang memberikan nilai tambah pada kegiatan ini (isu-isu yang berkaitan dengan sektor pertanian, perspektif anak perempuan selama dan setelah konflik, tantangan perempuan di pasar tenaga kerja, dll.) dan untuk mengembangkan daftar mitra yang lebih komprehensif?
- Bagaimana para pemangku kepentingan mengoordinasikan kegiatan untuk mencapai agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan?
- Pemangku kepentingan manakah yang mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai perdamaian dan keamanan?

Tabel 6 menyajikan matriks analisis dampak untuk membantu memetakan pemangku kepentingan.³⁸ Gambar 2 menyajikan kategori pemangku kepentingan.

Tabel 6: Matriks analisis dampak pemangku kepentingan

Analisis pemangku kepentingan	Minat (rendah, sedang, tinggi)	Pengaruh (kecil, sedang, besar)	Apa yang penting bagi pemangku kepentingan?	Bagaimana pemangku kepentingan bisa berkontribusi terhadap rencana aksi nasional?	Strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan
Pemangku kepentingan satu					
Pemangku kepentingan dua					
Pemangku kepentingan tiga					

Gambar 2: Kategori pemangku kepentingan menurut tingkat pengaruhnya



6. Membangun platform konsultatif dan inklusif yang terdiri dari para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang untuk berbagi informasi secara reguler dan transparansi

Koordinasi

Pembentukan mekanisme koordinasi internal yang efisien dan pemilihan lembaga pemerintah yang memimpin untuk mendorong perencanaan sangatlah penting dalam rangka mendapatkan sokongan dan dukungan kelembagaan yang luas.³⁹ Hal ini harus dilakukan pada tahap awal. Mengingat luasnya cakupan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, kolaborasi lintas sektoral adalah kunci keberhasilan koordinasi dan implementasi. Contoh lembaga pemimpin yang efektif di ASEAN antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia, Kantor Penasihat Presiden untuk Proses Perdamaian di Kantor Presiden Filipina, dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri di Timor-Leste.

Langkah pertama dalam membangun mekanisme koordinasi yang efektif adalah menganalisis budaya Organisasi pemerintah secara keseluruhan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti:⁴⁰

- Bagaimana keputusan implementasi akan dibuat?
- Apakah model mekanisme koordinasi multi-lembaga yang potensial sudah ada?
- Apa yang berhasil dengan baik sebelumnya (atau yang tidak berhasil)?

Budaya, mandat dan isu-isu lain dari masing-masing lembaga juga perlu dipertimbangkan:⁴¹

- Apakah setiap lembaga memiliki jadwal yang sama untuk perencanaan strategis?
- Apakah lembaga-lembaga yang berbeda memiliki pedoman yang sama mengenai alokasi sumber daya selama penyusunan anggaran Organisasi mereka?
- Apa perbedaan utama dalam anggaran atau kepegawaian untuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam rencana tersebut?
- Komitmen kepegawaian dan sumber daya apa saja yang dapat dibangun oleh masing-masing lembaga saat ini?

Dalam mengidentifikasi suatu entitas yang akan menjadi ujung tombak perencanaan, disarankan untuk menempatkan proses perencanaan pada atau menerima dukungan dari kementerian yang berpengaruh, seperti kementerian perencanaan nasional, kementerian pertahanan, kementerian luar negeri, kementerian hukum, atau kementerian dalam negeri. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan dukungan politik yang berkelanjutan dan mengamankan pendanaan yang diperlukan.

Terdapat beberapa model koordinasi yang melibatkan satu atau lebih lembaga. Sekitar dua pertiga dari rencana aksi nasional yang ada telah disusun oleh konsorsium kementerian.⁴² Di beberapa negara, rencana tersebut menargetkan isu-isu keamanan eksternal di luar batas negara dan oleh karena itu seringkali dipimpin oleh kementerian yang mengawasi urusan luar negeri dan isu-isu yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Di negara-negara lain, rencana tersebut mungkin berfokus pada konflik internal dan/atau situasi pascakonflik. Di Filipina, misalnya, Kantor Penasihat Presiden untuk Perdamaian, Rekonsiliasi, dan Persatuan memimpin rencana aksi nasional. Beberapa rencana dipimpin oleh kementerian yang bertanggung jawab atas kesetaraan gender dan urusan perempuan, seperti yang terjadi di 10 negara Afrika – Burundi, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, dan Uganda.⁴³

Terlepas dari kementerian atau kementerian mana yang memimpin, badan pengawas harus memiliki dukungan yang memadai dari pemerintah serta sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, dan wewenang untuk menyusun dokumen strategis yang didukung dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan terkait.

Inisiatif lain untuk mendukung koordinasi adalah:

- Komite sektoral untuk setiap pilar agenda perempuan, perdamaian dan keamanan dengan perwakilan dari berbagai latar belakang
- Gugus tugas tingkat tinggi dan kelompok kerja koordinasi
- Kerangka acuan struktur koordinasi dan implementasi
- Penunjukan resmi focal point yang fokus pada perempuan, perdamaian, dan keamanan dengan otoritas pengambilan keputusan politik dari berbagai kementerian yang terlibat dalam rencana tersebut

Konfigurasi struktur koordinasi

Struktur koordinasi dapat diatur dalam dua tingkatan:⁴⁴

Tingkatan strategis, dengan badan tingkat tinggi yang terdiri dari wakil/asisten menteri atau kepala departemen yang menetapkan tujuan strategis, memberikan dukungan politik yang diperlukan, mendorong partisipasi seluruh pemerintah, dan bertindak sebagai mekanisme akuntabilitas utama.

Tingkatan operasional, yang terdiri dari staf teknis yang ditunjuk sebagai focal point rencana aksi nasional/perempuan, perdamaian dan keamanan/gender di kementerian/departemen/lembaga masing-masing, dan bertugas mengelola program secara sinergi dengan aktor lain.

Beberapa saluran koordinasi yang berbeda adalah:⁴⁵

Koordinasi vertikal: Beberapa negara, seperti Nigeria, memilih untuk menugaskan satu lembaga yang bertanggung jawab mengelola koordinasi; lembaga tersebut juga bertugas melaksanakan kegiatan.

Koordinasi horisontal: Koordinasi terjadi dalam sebuah badan perwakilan dari sejumlah kecil kementerian utama yang terlibat dalam implementasi, seperti di Bosnia dan Herzegovina.

Koordinasi pengawasan: Amerika Serikat menggunakan model ini, dimana badan eksekutif, Dewan Keamanan Nasional, mengawasi pelaksanaannya.

Salah satu prinsip utamanya adalah membangun struktur koordinasi dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait secara partisipatif (Kotak 1). Pertimbangan yang tepat harus diberikan untuk mengelola dinamika antara organisasi yang memiliki perbedaan dalam kekuasaan, sumber daya, dan mandat. Karena rencana aksi biasanya dilaksanakan selama tiga sampai lima tahun, keberhasilan pengelolaan akan menentukan keberlanjutan dan dampaknya, terutama jika sering terjadi pergantian kepemimpinan politik yang dapat mengganggu komitmen kebijakan. Focal point atau champion di kementerian dan lembaga terkait juga membantu memastikan kesinambungan.⁴⁶

Kotak 1: Menciptakan mekanisme koordinasi yang inklusif

Untuk memperkuat harmonisasi kegiatan dalam rencana aksi nasional kedua, para pemimpin di Bosnia dan Herzegovina membentuk sebuah dewan koordinasi yang diatur berdasarkan kerangka acuan yang jelas. Dewan tersebut terdiri dari perwakilan seluruh kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut. Dewan tersebut juga berjenjang, yang berarti terdapat fungsi di tingkat eksekutif (misalnya, komite pengarah di tingkat yang lebih tinggi) dan komponen teknis (pelaksana dan ahli teknis).

Sumber: Lippai dan Young, 2017.

Gambar 3 merangkum komponen-komponen utama untuk mengoordinasikan rencana berdampak besar.^{47,48}

Gambar 3: Koordinasi untuk rencana-rencana berdampak besar

- 1 Menciptakan visi yang menginspirasi
- 2 Memotivasi orang untuk mendukung visi
- 3 Mengelola penyampaian visi
- 4 Membangun hubungan kuat berbasis kepercayaan untuk menyokong visi

Kolaborasi

Penyusunan rencana aksi nasional memerlukan kemitraan antar aktor nasional dan dengan lembaga bilateral, regional, dan multilateral yang dapat menghasilkan dukungan politik dan keuangan (Kotak 2).⁴⁹ Salah satu sumber daya penting adalah Jaringan Focal Points Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan yang dibentuk pada tahun 2017 untuk membantu Negara-negara Anggota PBB dan Organisasi regional.⁵⁰ Malaysia, Filipina dan Thailand adalah bagian dari jaringan ini. Jaringan tersebut mendukung negara-negara, Organisasi regional dan PBB dalam mengintegrasikan komitmen global terhadap perempuan, perdamaian dan keamanan dalam kebijakan dan perundang-undangan dalam negeri, dan didukung oleh UN Women sebagai Sekretariatnya (lihat juga Kotak 3 dan 4). Jaringan ini berfungsi sebagai forum lintas kawasan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, meningkatkan koordinasi program pendanaan dan bantuan, dan mendorong arus informasi dengan forum-forum relevan seperti Kelompok Pakar Informal Dewan Keamanan untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dan Kelompok Sahabat Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.⁵¹

Kotak 2:

Contoh kolaborasi internasional dalam mengembangkan rencana aksi nasional

United Nations Population Fund dan UN Women mendukung pengembangan rencana aksi nasional Uganda. Pantai Gading mendapat bantuan dari Program Pembangunan PBB. Kementerian Gender dan Pembangunan Liberia bekerja sama dengan United Nations Mission in Liberia, UN Women, dan organisasi internasional lainnya dalam mengembangkan rencana tersebut. Di Republik Demokratik Kongo dan Nepal, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendukung kegiatan untuk mengimplementasikan resolusi 1325.

Sumber: Lippai dan Young, 2017.

Kotak 3:

Nilai tambah bermitra dengan UN Women

Di tingkat negara, pendekatan inklusif UN Women, kekuatan menyelenggarakan pertemuan dan persepsi netralitas memungkinkan untuk memenuhi mandat koordinasi dalam mendukung rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Di tingkat global, melalui peran normatifnya, UN Women memimpin isu perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam ruang kebijakan global dan membantu menetapkan standar untuk proses nasional.

Sumber: UN Women, 2021.

Kotak 4:

Terlibat dengan masyarakat sipil di Yordania

Sebelum meluncurkan rencana aksi nasional Yordania, Komisi Nasional Perempuan bekerja sama dengan UN Women menyelenggarakan konsultasi nasional guna mengumpulkan beragam perspektif mengenai prioritas. Konsultasi ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai resolusi 1325 dan maksud dari rencana Yordania. Lebih dari 250 laki-laki dan perempuan yang mewakili pemerintah dan masyarakat sipil berpartisipasi, mengidentifikasi 14 isu prioritas

Sumber: Lippai dan Young, 2017.

7. Memfasilitasi partisipasi yang bermakna dari masyarakat sipil dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi nasional

Sebuah survei terhadap anggota Komite ASEAN untuk Perempuan memperkuat bahwa masyarakat sipil memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi rencana aksi nasional, terutama melalui kemampuan mereka “untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga-lembaga pemerintah”⁵² (lihat Kotak 5). Pernyataan Bersama Para Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 2017 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi bermakna organisasi dan jaringan masyarakat sipil perempuan “dalam pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik bersenjata, serta rekonstruksi pembangunan perdamaian pascakonflik dan rehabilitasi”⁵³.

Melibatkan kelompok-kelompok ini berakar kuat pada agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, yang terus memelopori upaya untuk mencegah kekerasan, menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara yang konstruktif, dan membantu membangun kekuatan dan ketahanan komunitas untuk menghadapi ancaman manusia dan alam terhadap perdamaian dan keamanan.⁵⁴ Di negara-negara yang memiliki rencana aksi nasional, masyarakat sipil memainkan banyak peran. Peran tersebut antara lain mendukung konsultasi di tingkat akar rumput, seperti yang dilakukan di Filipina dalam rangka mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi regional untuk Bangsamoro. Masyarakat sipil merupakan mitra dalam implementasi, pemantauan dan pelaporan hasil tinjauan digital rencana aksi nasional pertama di Indonesia.

Baru-baru ini, selain aktor-aktor tradisional seperti Organisasi berbasis masyarakat dan kelompok perempuan, partisipasi segmen masyarakat sipil lainnya dalam rencana aksi nasional, termasuk Organisasi berbasis agama, pemimpin pemuda, Organisasi lainnya yang mewakili perspektif anak perempuan selama dan setelah konflik, serta organisasi lainnya dengan latar belakang berbeda, meningkat secara signifikan. Khususnya berlaku bagi akademisi/lembaga think tank dan media.⁵⁵

Masyarakat sipil secara keseluruhan dapat memainkan peran yang sangat berharga dalam meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi rencana aksi nasional. Masyarakat sipil dapat memberikan perspektif penting mengenai akar penyebab diskriminasi berbasis gender dan dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, anak laki-laki, dan anak perempuan dalam keadaan damai serta dalam keadaan konflik dan pascakonflik. Dalam konteks pascakonflik atau transisi, yang sering kali terjadi data hilang, masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai sumber informasi penting dan mitra yang berharga dalam implementasi. Dengan munculnya ancaman keamanan manusia non-tradisional, peran masyarakat sipil menjadi semakin penting dalam membantu perempuan berorganisasi untuk memajukan keadilan transisi.⁵⁶

Kotak 5: **Kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah di Indonesia dan Filipina**

Di Indonesia, Asian Muslim Action Network, sebuah Organisasi berbasis agama, bekerja sama dengan Pemerintah setelah rencana aksi nasional pertama menyelesaikan tinjauan digital atas kinerjanya. Temuan-temuan ini berkontribusi pada dimasukkannya isu perubahan iklim, ekstremisme kekerasan, dan pandemi COVID-19 ke dalam penyusunan rencana kedua.

Di Filipina, rencana regional Bangsamoro yang kedua (2020-2022) diasesmen bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Laporan ini mengidentifikasi beberapa pencapaian penting, seperti pencapaian dalam membangun hubungan antara konflik bersenjata dan isu-isu tata kelola serta perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan, pengumpulan data, dan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk mitra pelaksana dan lainnya. Kesimpulan tersebut berkontribusi pada perumusan rencana regional ketiga (2023-2028) yang selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022; Kantor Regional Chief Minister, 2023.

Poin Penting

Masyarakat sipil dapat memberikan berbagai layanan untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional, termasuk menangkap beragam realitas yang spesifik dalam konteks tertentu, yang membantu dalam memobilisasi dukungan dan menghasilkan dukungan dari seluruh konstituen yang berbasis luas (internasional, nasional, lokal, dan akar rumput), membangun kapasitas lokal dalam implementasi, berkontribusi pada kampanye penggalangan dana, dan membantu monitoring dan evaluasi untuk membantu pemerintah memikirkan kembali prioritas nasional dari perspektif gender.

8. Mengidentifikasi bidang utama penyelarasan antara kebijakan yang ada, kerangka kerja regional dan global, serta rencana aksi nasional

Keberhasilan rencana aksi nasional perlu didasarkan pada pemahaman yang baik mengenai kebijakan dan instrumen nasional untuk memfasilitasi integrasi program-program tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan kerangka kerja regional dan global.⁵⁷ Rencana tersebut harus mempromosikan hubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menumbuhkan dukungan politik dan kelangsungan hidup jangka panjang, yang juga dapat berkontribusi pada dukungan finansial. Kotak 6 menampilkan bidang utama yang perlu diselaraskan; Gambar 4 merangkum bidang-bidang kebijakan yang biasanya muncul kembali dalam rencana aksi nasional⁵⁸

Kotak 6: Bidang utama yang perlu diselaraskan dengan kebijakan, rencana, dan strategi yang ada

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Perempuan	Partisipasi dan Representasi
Sistem legislatif, yudikatif, dan konstitusional	Program kemanusiaan
Sistem untuk memastikan keamanan dan perlindungan fisik	Perundingan resolusi konflik (formal dan informal) dan perjanjian perdamaian
Hak sosial ekonomi (tanah, properti, pendidikan, literasi, keamanan ekonomi, kesehatan primer)	Kontribusi nasional terhadap personel penjaga perdamaian, baik yang belum dibentuk maupun warga sipil
Perjuangan melawan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender	Proses pemilu, termasuk keterwakilan perempuan di partai politik sebelum dan sesudah pemilu
Kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi	Struktur kekuasaan dibentuk pada periode transisi pascakonflik
Perjuangan melawan HIV/AIDS	Rule of law dan lembaga pemerintahan yang demokratis

Bersambung ▼

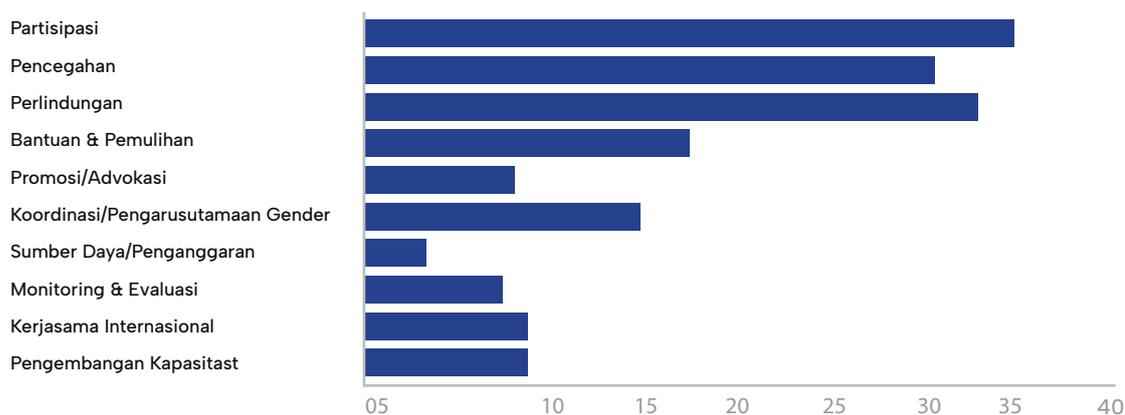
Pencegahan	Bantuan dan Pemulihan
Keadilan dan reparasi, termasuk keadilan transisi	Asesmen pascakonflik yang sensitif gender
Reformasi sektor keamanan; persyaratan khusus gender	Analisis anggaran gender dalam belanja pascakonflik untuk memungkinkan pelacakan sumber daya yang dialokasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan
Reformasi peradilan; persyaratan spesifik gender	Kesetaraan gender dalam distribusi dividen perdamaian seperti investasi besar pemulihan pascakonflik dalam program ketenagakerjaan atau layanan dasar publik
Budaya perdamaian baru berdasarkan kontribusi perempuan dan dibangun berdasarkan kesetaraan gender	Inklusi yang efektif terhadap perempuan kombatan atau perempuan yang terkait dengan kekuatan tempur dalam program perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi
Sistem deteksi konflik dini yang sensitif gender	Program reparasi
Program pendidikan di sekolah dan lembaga lain mengenai isu gender, pembangunan perdamaian, dan resolusi konflik	
Peningkatan kesadaran masyarakat umum mengenai isu keamanan gender	

9. Memilih aksi prioritas yang dipandu oleh komponen utama rencana aksi nasional berdampak tinggi

Pemilihan aksi prioritas untuk rencana nasional harus ditentukan melalui analisis yang cermat terhadap hubungan program dengan prioritas nasional dan instrumen internasional dan regional mengenai isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan. Informasi yang dikumpulkan dari penyelenggaraan lokakarya peningkatan kesadaran dan dialog sensitisasi dengan para pemangku kepentingan utama serta analisis situasi, yang merupakan awal mula proses pemilihan aksi prioritas, dapat menambah nilai pada kegiatan ini.

Analisis konteks bisa menjadi penting untuk memulai proses mengidentifikasi prioritas strategis untuk rencana aksi nasional.⁵⁹ Analisis ini juga dapat menghasilkan baseline yang terukur, termasuk melalui identifikasi dan perancangan indikator spesifik mengenai pengalaman perempuan dalam konflik dan kontribusinya terhadap resolusi konflik. Gambar 4 mencantumkan beberapa bidang prioritas nasional yang dipilih di dalam rencana aksi nasional yang ada.⁶⁰

Gambar 4: Bidang-bidang prioritas yang selalu berulang di dalam rencana aksi nasional yang ada



Rencana Aksi Regional ASEAN mempunyai empat aksi prioritas yang mencakup pilar-pilar utama agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan: perlindungan, partisipasi, pencegahan, serta Bantuan dan pemulihan. Masing-masing pilar memiliki satu hasil, kecuali pencegahan, yang memiliki dua hasil, yaitu mengintegrasikan perempuan secara penuh ke dalam inisiatif untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan serta pencegahan kekerasan seksual dan berbasis gender. Hasil keenam adalah implementasi, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Keempat pilar tersebut mempunyai 14 keluaran⁶¹ dan 78 aksi prioritas. Penilaian cepat terhadap hasil, keluaran, dan kegiatan yang paling relevan di suatu negara tertentu, serta informasi yang dikumpulkan dari survei, ditambah dengan elemen-elemen terpilih dari enam komponen utama rencana aksi nasional berdampak tinggi, dapat membantu dalam mengidentifikasi aksi prioritas yang spesifik untuk suatu negara.

Tabel 7 mengilustrasikan enam komponen rencana aksi nasional berdampak tinggi beserta persyaratannya. Tabel 8 dapat membantu negara-negara anggota ASEAN memilih aksi prioritas untuk rencana nasional dengan penyesuaian yang diperlukan terhadap konteks nasional.⁶²

Tabel 7: Enam komponen rencana aksi nasional berdampak tinggi

Keinginan politik	Desain	Koordinasi	Masyarakat sipil	Monitoring dan evaluasi	Anggaran dan Pembiayaan
Pemimpin mengetahui tentang resolusi 1325, menganggapnya sebagai perluasan tujuan negara, memandang perempuan sebagai agen perubahan; dan mengambil langkah-langkah (pada tingkat tinggi) untuk memajukan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan melalui implementasi (pada tingkatan teknis) dari rencana aksi nasional.	Rencana aksi nasional didukung dengan kerangka kerja yang logis yang menguraikan hasil spesifik, menyelaraskan dengan resolusi 1325 dan strategi serta kebijakan yang ada (seperti strategi keamanan nasional), dan dibentuk melalui proses yang inklusif yang digerakkan oleh pemangku kepentingan- (Misalnya, para pemimpin lokal, penerima manfaat potensial di tingkat subnasional dikonsultasikan).	Peran dan tanggung jawab didelegasikan di dalam aksi nasional dengan jelas pada badan koordinasi rencana aksi nasional, anggota dari badan tersebut berbagi komitmen yang digerakkan oleh misi hingga tujuan jangka panjang dan badan tersebut mencakup mekanisme untuk menyelenggarakan pelaksana yang akuntabel (misalnya, fungsi pengawasan).	Masyarakat sipil diwakili secara adil melalui proses rancangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi	Rencana, tools, dan sistem berjalan untuk mengumpulkan menganalisis, dan melaporkan data; informasi ini digunakan lebih lanjut untuk meningkatkan hasil dan mengedukasi para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan dampak rencana aksi nasional..	Rencana aksi nasional disertai dengan anggaran yang membahas sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan yang diuraikan di dalam strategi tersebut

Sumber: Lippai dan Young, 2017.

Tabel 8: Pemilihan aksi prioritas untuk rencana aksi nasional

Prioritas pembangunan nasional (undang-undang/kebijakan)	Isu-isu utama dari empat pilar agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan	Aksi prioritas dalam Rencana Aksi Regional yang relevan dengan konteks nasional	Elemen-elemen yang relevan dalam rencana aksi nasional berdampak tinggi	Bidang prioritas yang dipilih untuk rencana aksi nasional
<i>Perlindungan</i>				<i>Aksi prioritas 1: perlindungan</i>
				<i>Kegiatan</i>
<i>Partisipasi</i>				<i>Aksi prioritas 2: partisipasi</i>
				<i>Kegiatan</i>
<i>Pencegahan</i>				<i>Aksi prioritas 3: pencegahan</i>
				<i>Kegiatan</i>
<i>Bantuan dan pemulihan</i>				<i>Aksi prioritas 4: Bantuan dan pemulihan</i>
				<i>Kegiatan</i>
<i>Ancaman yang muncul di negara tertentu: radikalisme dengan kekerasan, bencana yang disebabkan oleh iklim dan perpindahan paksa, perdagangan manusia, dan lain-lain</i>				<i>Bidang aksi prioritas:</i> <i>Kegiatan:</i>

10. Memastikan transparansi dan akuntabilitas

Akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan dan implementasi rencana aksi nasional sangatlah penting, sehingga memerlukan kewaspadaan terus-menerus untuk mendeteksi kesalahan langkah dan melakukan perubahan yang relevan. Beberapa pertanyaan penting untuk ditanyakan adalah:⁶³

- Se jauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi diurusutamakan dalam perencanaan dan implementasi rencana aksi nasional?
- Se jauh mana intervensi untuk mencapai prioritas bersama dalam kebijakan nasional dan Rencana Aksi Regional diimplementasikan secara transparan dan akuntabel?
- Kesenjangan besar apa yang perlu diatasi? Daerah mana saja yang memerlukan percepatan?

Mempertahankan tingkat akuntabilitas yang tinggi memerlukan praktik dengan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, termasuk:⁶⁴

- **Horizontal:** terlibat dengan orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak kegiatan rencana
- **Ke dalam:** akuntabilitas kepada anggota tim rencana aksi nasional
- **Ke luar:** akuntabilitas kepada orang-orang di komunitas yang terkait dengan perempuan, upaya perdamaian dan keamanan
- **Ke atas:** melaporkan kembali kepada kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Regional atau donor yang menyediakan sumber daya

Mengarusutamakan transparansi dalam rencana aksi nasional memerlukan kejelasan dan keterbukaan mengenai kegiatan, tujuan, dan keuangan, serta pengelolaan harapan mengenai pencapaiannya. Alokasi dan penggunaan sumber daya yang adil, efisien, dan efektif membantu meningkatkan legitimasi dan nilai uang.⁶⁵ Beberapa aksi untuk memperdalam akuntabilitas dan transparansi adalah sebagai berikut.⁶⁶

- Memberikan perincian tentang bagaimana, di mana, dan untuk tujuan apa rencana tersebut menggunakan sumber dayanya untuk memastikan nilai uang.
- Menetapkan kerangka kerja berbasis bukti untuk mencapai hasil.
- Mengembangkan saluran pelaporan yang jelas secara berkala berdasarkan gambaran program yang terpadu.
- Mendukung pengembangan kapasitas di kalangan pejabat pelaksana untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas dan transparansi.
- Memastikan bahwa monitoring dan evaluasi rencana dan anggota staf dapat melakukan evaluasi yang tidak memihak terhadap kinerja rencana dan memberikan jaminan kepada otoritas yang ditunjuk.

Poin Penting

Mengintegrasikan akuntabilitas dan transparansi dalam mengimplementasikan rencana aksi nasional memerlukan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas di antara mitra pelaksana. Hal ini perlu ditetapkan sejak awal untuk memastikan pengawasan yang berkelanjutan. Elemen penting lainnya adalah pengarusutamaan budaya integritas dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sejak tahap perencanaan, dikombinasikan dengan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang kuat.

Penting juga untuk memiliki pendekatan yang praktis dan realistis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pengukuran kinerja yang kuat. Mungkin perlu waktu dan proses untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mitra, termasuk dukungan pengembangan kapasitas jangka menengah dan panjang untuk memastikan kepemilikan dan upaya kolektif untuk meningkatkan pengumpulan data, pelaporan, dan analisis kemajuan dalam implementasi.

Menyusun rencana aksi nasional

Setelah pengumpulan data dan informasi pada Langkah 1, Langkah 2 berfokus pada pengumpulan rincian yang relevan untuk menyusun rencana aksi nasional. Langkah ini merupakan landasan yang menentukan kualitas rencana karena langkah ini mengatasi isu-isu inti seperti pemilihan anggota komite untuk memastikan bahwa mereka mewakili beragam Organisasi dan bahwa proses penyusunannya bersifat inklusif; penyalarsan rencana aksi nasional dengan Rencana Aksi Regional dan kegiatan-kegiatan utama yang diperlukan untuk memfasilitasi upaya ini; dan terakhir, dua komponen penting yaitu monitoring dan evaluasi serta penetapan biaya kegiatan rencana aksi nasional sebagai pilar implementasi yang efektif.

1. Membentuk komite atau gugus tugas untuk mulai menyusun rencana aksi nasional

Pembuatan rencana aksi nasional yang efektif bergantung pada keterlibatan perwakilan dari kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil. Pada Langkah 2, komite perumus atau gugus tugas harus mengumpulkan aktor-aktor yang dapat memobilisasi kepentingan, meningkatkan kesadaran dan memimpin proses secara keseluruhan. Komite perumus atau gugus tugas tersebut dapat mencakup individu-individu yang bertugas membangun kemauan politik awal untuk rencana aksi nasional dan yang memiliki pengalaman dalam perencanaan strategis.

Beberapa negara mungkin memutuskan untuk mempekerjakan seorang ahli di bidang perempuan, perdamaian, dan keamanan untuk mendukung proses tersebut. Misalnya, di Liberia, Pemerintah memanfaatkan dukungan teknis UN Women untuk menyusun rencana aksi nasional yang kedua. Kelompok kerja yang mengkoordinasikan penyusunan rancangan biasanya berubah menjadi kelompok yang mendukung implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Anggota komite perumus harus:⁶⁷

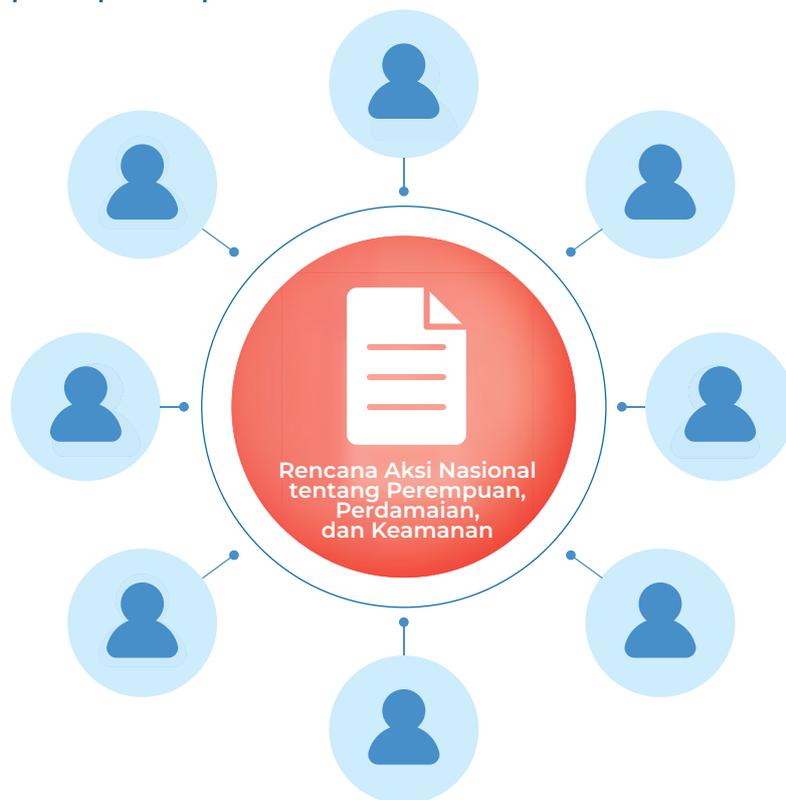
- Memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu utama tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan serta prioritas nasional tentang perdamaian dan keamanan sehingga dapat memajukan keduanya secara bersamaan
- Mewakili beragam Organisasi dari pemerintah, penelitian, masyarakat sipil, dan lainnya yang memiliki pengalaman dalam perencanaan strategis dan keterampilan untuk melakukan asesmen kegiatan nasional

Komite perumus dapat terdiri dari beberapa atau lebih hal berikut:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Perwakilan pemerinta | <ul style="list-style-type: none">• Dari kementerian atau lembaga terkait, seperti kementerian urusan luar negeri, kementerian pertahanan, kementerian hukum, kementerian dalam negeri, dan kementerian keuangan• Focal point atau pakar gender di pemerintahan |
| 2 | Organisasi Masyarakat Sipil | <ul style="list-style-type: none">• Perwakilan dari Organisasi hak-hak perempuan• Non Governmental Organization (NGO) yang bekerja pada isu gender dan perdamaian• Perwakilan dari Organisasi yang berfokus pada aspek-aspek spesifik dari agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, seperti pencegahan konflik atau rekonstruksi pascakonflik |
| 3 | Akademisi | <ul style="list-style-type: none">• Para ahli atau peneliti kajian gender yang memiliki pengetahuan mengenai kajian konflik dan perdamaian |
| 4 | Entitas PBB dan Organisasi internasional | <ul style="list-style-type: none">• Perwakilan dari UN Women dan/atau entitas PBB terkait lainnya• Para ahli dari Organisasi internasional dengan pengalaman dalam isu konflik dan gender |

5	Tokoh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan dari organisasi masyarakat setempat atau tokoh dengan pengalaman akar rumput di daerah yang terkena dampak konflik
6	Perwakilan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi Pemuda atau advokasi dengan fokus pada perdamaian dan keamanan
7	Kelompok masyarakat adat dan minoritas	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan dari masyarakat adat atau kelompok minoritas untuk memastikan perspektif dan kebutuhan unik mereka
8	Pakar hukum dan hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none"> Dengan pengetahuan tentang hukum dan mekanisme hak asasi manusia internasional yang relevan dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan
9	Perwakilan media	<ul style="list-style-type: none"> Jurnalis atau pakar media untuk memfasilitasi komunikasi dan membangun kesadaran
10	Pakar gender	<ul style="list-style-type: none"> Untuk memberikan keahlian teknis mengenai pengarusutamaan gender dan program yang responsif gender, termasuk perwakilan dari organisasi yang menangani integrasi perspektif anak perempuan dalam situasi pascakonflik
11	Ahli resolusi konflik dan pembangunan perdamaian	<ul style="list-style-type: none"> Ahli dalam resolusi konflik, pembangunan perdamaian, dan pencegahan konflik
12	Penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Perwakilan dari Organisasi atau advokat yang berfokus pada keterlibatan penyandang disabilitas dalam upaya perdamaian dan keamanan
13	Pemimpin etnis dan agama	<ul style="list-style-type: none"> Dari berbagai kelompok etnis dan agama untuk mempromosikan inklusivitas dan toleransi beragama dalam proses perdamaian
14	Perwakilan pemuda dan gender	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan dan laki-laki muda dengan keahlian atau pengalaman advokasi terkait isu gender dan pemuda
15	Pakar independen	<ul style="list-style-type: none"> Individu dengan keahlian relevan di bidang gender, konflik, dan pembangunan perdamaian yang dapat memberikan bimbingan yang tidak memihak.

Gambar 5: Komposisi panitia perumus



Komite perumus harus menunjuk seorang koordinator dan menugaskan badan-badan untuk memimpin tugas-tugas khusus terkait dengan persiapan rencana aksi nasional.⁶⁸ Komite ini akan menentukan cara menerima umpan balik internal dan eksternal dari para ahli dan pemangku kepentingan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Gambar 6 menyajikan tujuh elemen rencana aksi nasional yang inovatif.^{69,70}

Gambar 6: Unsur-unsur rencana aksi nasional yang inovatif



Kerangka/garis besar sementara untuk penyusunannya adalah sebagai berikut.⁷¹

Langkah pertama: Kembangkan garis besar rencana aksi nasional, yang mungkin berisi:

1. Daftar isi dan daftar singkatan
2. Surat dukungan politik (menteri, dll.)
3. Pendahuluan dengan informasi tentang:
 - Latar belakang/dasar pemikiran
 - Konteks global, resolusi 1325, dan resolusi terkait
 - Konteks nasional
 - Pemangku kepentingan dan peran mereka
 - Proses pembangunan, termasuk jadwal lokakarya, konferensi, pertemuan penting, konsultasi dengan masyarakat sipil, dan milestone lainnya

Tahap kedua: Uraikan substansinya antara lain:

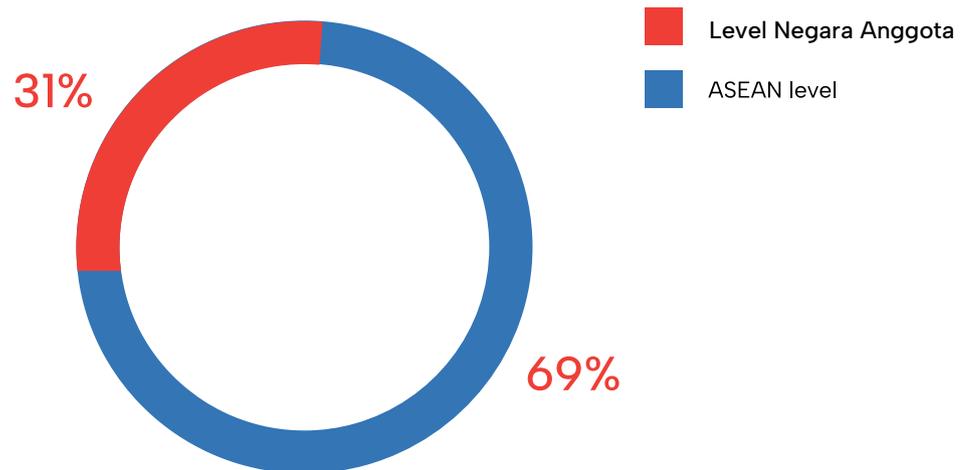
- Tujuan
- Matriks hasil teori perubahan, termasuk indikator untuk mengukur kemajuan, aksi/kegiatan prioritas utama, pihak pelaksana dan penanggung jawab tertentu serta mitra lainnya, dan anggaran (untuk pencegahan, perlindungan, partisipasi, bantuan dan pemulihan, serta koordinasi, monitoring, dan pelaporan)
- Rencana monitoring dan evaluasi
- Koordinasi dan implementasi

Panitia perumus harus menetapkan tanggal target spesifik untuk setiap kegiatan dan jangka waktu penyelesaian rencana secara keseluruhan. Rencana ini harus realistis dan memberikan cukup waktu untuk menyiapkan langkah-langkah administratif, sumber daya, pendidikan, dan infrastruktur yang diperlukan.

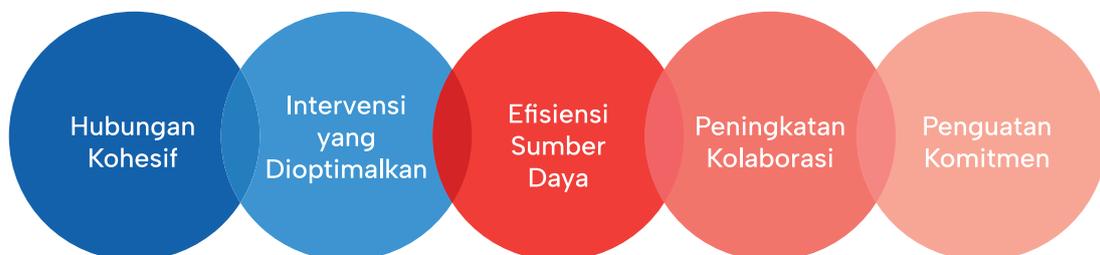
2. Menyusun rencana nasional yang selaras dengan Rencana Aksi Regional

Rencana aksi nasional harus sejalan dengan Rencana Aksi Regional. Yang terakhir ini terutama berkonsentrasi pada pelaksanaan aksi di tingkat nasional, dengan lebih dari 80 persen tugas berada dalam yurisdiksi masing-masing Negara anggota ASEAN (Gambar 7). Peran penting negara-negara dalam menerapkan rencana tersebut ke dalam praktik nasional dapat menjadikannya sebagai kekuatan katalitik dalam mendorong perubahan positif dan berdampak bagi perempuan dan anak perempuan (Gambar 8).

Gambar 7: Aksi prioritas dalam Rencana Aksi Regional



Gambar 8: Manfaat menyelaraskan rencana nasional dan rencana regional



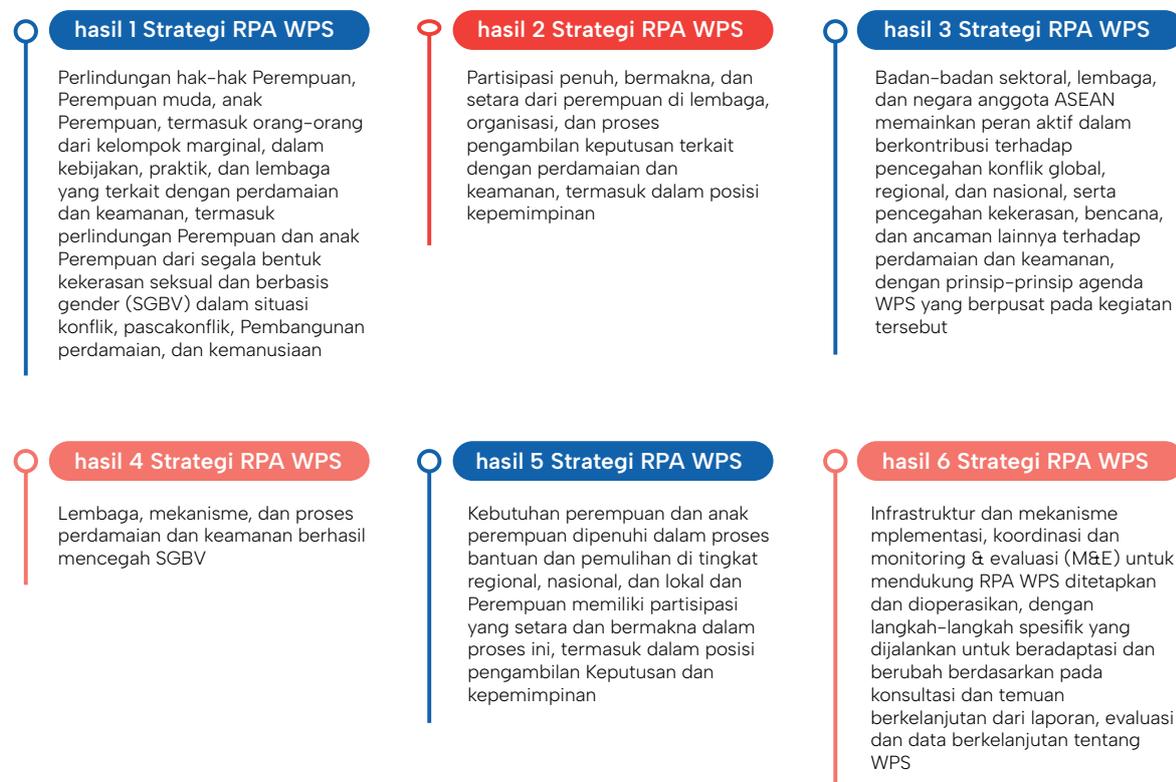
Penyelarasan strategis nasional dan regional, yang dikelola melalui monitoring dan evaluasi yang dirancang dengan baik, mengoptimalkan efektivitas intervensi lokal dan regional, dan menjaga wilayah ini tetap pada jalurnya secara keseluruhan. Sinkronisasi menghilangkan duplikasi dan tumpang tindih, memungkinkan alokasi sumber daya yang ditargetkan ke bidang-bidang yang memerlukan perhatian signifikan, menyederhanakan prosedur pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas dengan memperkenalkan indikator dan tolok ukur bersama untuk mengukur kemajuan.

Penyelarasan terutama memfasilitasi kolaborasi antar negara anggota, mendorong lingkungan untuk bertukar praktik terbaik, berbagi pengetahuan, dan mengupayakan kolaborasi untuk memperkuat dampak. Penyelarasan tersebut memperkuat pendekatan terpadu ASEAN untuk mengatasi tantangan sensitif gender di bidang perdamaian dan keamanan dan menyampaikan pesan yang kuat tentang dedikasi kolektif terhadap perempuan, perdamaian, dan keamanan. Dengan menunjukkan kesatuan ini, ASEAN dapat meningkatkan kredibilitas dan pengaruh globalnya, sehingga berpotensi menarik peningkatan dukungan dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan internasional.

Rencana Aksi Regional memberikan arahan eksplisit tentang implementasi agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, sembari mengakui pentingnya inovasi berbasis bukti dan pendekatan lokal. Rencana tersebut menyoroti praktik-praktik yang patut dicontoh dan mendorong kemitraan antara akar rumput dan strategi nasional atau regional yang lebih luas.

Dengan menyusun aksi prioritas yang selaras dengan pilar-pilar utama perlindungan, partisipasi, pencegahan, pemberian bantuan dan pemulihan, rencana regional ini secara efektif mengarahkan upaya untuk menyatukan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam inisiatif perdamaian dan keamanan yang lebih luas. Khususnya, matriks khusus didedikasikan untuk melacak kemajuan dan koordinasi (Gambar 9).

Gambar 9: Matriks aksi Rencana Aksi Regional



Melakukan kegiatan pemetaan

Kegiatan pemetaan dapat menilai bagaimana rencana nasional bisa selaras dengan tujuan strategis Rencana Regional, dengan menunjukkan dengan tepat bidang-bidang yang selaras dan kemungkinan perbedaan. Pemetaan ini membekali pemerintah pusat dengan tools untuk menyeimbangkan berbagai aksi prioritas daerah. Pemetaan ini memfasilitasi identifikasi prioritas utama nasional yang sejalan dengan tujuan daerah, dengan mempertimbangkan dampak dan keterhubungan. Pemahaman yang mendalam ini dapat membantu menyempurnakan fokus tingkat negara dan membentuk prioritas yang lebih tepat, serta mengarahkan alokasi sumber daya dan aksi yang ditargetkan.

ASESMEN MANDIRI TERHADAP PENYESUAIAN DENGAN HASIL RENCANA REGIONAL

1. Hasil strategis 1: perlindungan hak
 - Bagaimana kebijakan dan praktik nasional menangani perlindungan perempuan, perempuan muda, dan anak perempuan dari kekerasan seksual dan berbasis gender dalam situasi konflik, pascakonflik, pembangunan perdamaian, dan kemanusiaan?
 - Apakah kelompok marginal cukup terwakili dalam kebijakan nasional terkait perdamaian dan keamanan?
 - Bagaimana efektivitas tindakan pencegahan kekerasan seksual dan berbasis gender dapat diukur dan ditingkatkan?
2. Hasil strategis 2: partisipasi perempuan
 - Langkah-langkah apa yang ada untuk memastikan partisipasi perempuan secara penuh dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan di berbagai tingkat?
 - Bagaimana jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan di lembaga dan organisasi terkait dapat dilacak dan ditingkatkan?
 - Apakah ada mekanisme untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam peran kepemimpinan?
3. Hasil strategis 3: Peran ASEAN dalam pencegahan konflik
 - Bagaimana kontribusi pemerintah pusat terhadap upaya pencegahan konflik global, regional, dan nasional sejalan dengan prinsip-prinsip agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan?
 - Aksi spesifik apa yang telah diambil untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam strategi pencegahan konflik yang ada?
4. Hasil strategis 4: mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender
 - Bagaimana lembaga perdamaian dan keamanan mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender secara efektif?
 - Mekanisme apa yang ada untuk mengatasi dan merespons kejadian kekerasan seksual dan berbasis gender dalam konteks pasukan keamanan atau yang terkait dengan konflik?
 - Bagaimana keberhasilan upaya pencegahan kekerasan seksual dan berbasis gender dapat diukur dan ditingkatkan?
5. Hasil strategis 5: kebutuhan perempuan dan anak perempuan dalam pemberian bantuan dan pemulihan
 - Bagaimana proses pemberian bantuan dan pemulihan dapat memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan di tingkat regional, nasional, dan lokal?
 - Langkah-langkah apa yang diambil untuk memastikan partisipasi perempuan yang bermakna dalam pengambilan keputusan selama proses pemberian bantuan dan pemulihan?
 - Bagaimana dampak dari upaya pemberian bantuan dan pemulihan yang responsif gender dapat dinilai dan ditingkatkan?
6. Hasil strategis 6: implementasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi
 - Apakah terdapat mekanisme dan infrastruktur nasional yang mapan untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan terkait dengan Rencana Aksi Regional?
 - Proses konsultasi apa yang ada untuk mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan terkait dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik mereka?

Mengembangkan kerangka logis dan teori perubahan

Dalam mengembangkan rencana aksi nasional, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang selaras dengan tujuan nasional dan regional akan mengalihkan fokus dari sekadar mengukur keluaran menjadi memahami hasil. Meskipun keluarannya dapat diukur, penentuan prioritas terhadap efektivitas yang lebih luas dan hasil-hasil sosial membantu menghindari potensi distorsi dan keterbatasan. Kerangka kerja yang logis, atau log frame, harus menggambarkan tujuan, hasil dan keluaran rencana. Peta jalan terstruktur yang mewujudkan hubungan antara masukan dan hasil akhir adalah kuncinya. Peta jalan ini memerlukan pemahaman asumsi mendasar tentang kausalitas berdasarkan teori perubahan (Gambar 10).

Rencana aksi secara umum sering kali menguraikan strategi untuk mendorong perubahan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya gambaran komprehensif mengenai bagaimana kegiatan tertentu akan dilaksanakan. Tingkat kejelasan dan kelengkapan dalam merinci kegiatan adalah penting karena dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan untuk menangkap bagaimana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap hasil yang diinginkan. Mengartikulasikan perubahan yang spesifik dan terukur yang ingin dicapai melibatkan penyusunan indikator yang terdefinisi dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diinginkan, sehingga memungkinkan pelacakan kemajuan yang bermakna (Kotak 7 dan 8). Landasan yang kokoh dapat dibangun dengan memilih indikator berdasarkan teori perubahan.

Gambar 10. Apa yang dimaksud dengan teori perubahan?

Teori perubahan adalah peta konseptual tentang bagaimana kegiatan mengarah pada hasil

- ▶ Teori perubahan mengklarifikasi tujuan dari kegiatan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

- ▶ Teori perubahan memberi alasan tentang pentingnya mencapai hasil intermediate.

- ▶ Teori perubahan menetapkan struktur untuk mengidentifikasi metrik apa yang digunakan untuk mengukur.

- ▶ Teori perubahan membantu mengidentifikasi apa yang berjalan dan apa yang tidak berjalan.

- ▶ Teori perubahan menawarkan cara yang sederhana dan jelas untuk mengartikulasi misi dan dampak.

MASALAH	MASUKAN	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	INDIKATOR	DAMPAK
Permasalahan utama yang harus dipecahkan	Sumber daya yang diperlukan untuk meng-implementasikan kegiatan	Tindakan yang diambil untuk menghasilkan keluaran	Hasil dari sekumpulan kegiatan yang telah selesai	Perubahan yang Anda harapkan tercapai sebagai hasil dari kegiatan rencana aksi nasional	Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu	Pengaruh luas dan dalam jangka panjang dari rencana aksi nasional

Kotak 7: Rencana Aksi Nasional Swiss 2018–2022

Indikator dalam Rencana Aksi Nasional Swiss sangat berharga karena indikator tersebut memberikan keseimbangan antara pengukuran kuantitatif, seperti jumlah peserta, dan penilaian kualitatif, seperti peningkatan kesiapan para mediator, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan inklusivitas proses mediasi.

Subtujuan 2

Proses mediasi yang inklusif dan peka gender yang memungkinkan perspektif semua aktor yang terlibat untuk diikuti sertakan.

Langkah	Indikator Pelaporan	Tanggung Jawab
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Meningkatkan kesadaran orang-orang penting mengenai keuntungan dan efektivitas tim yang inklusif dalam proses mediasi. ▶ Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi modul pelatihan tentang gender dalam mediasi. ▶ Pengarahan dan pembekalan bagi para mediator yang berpraktik mengenai isu-isu gender dalam mediasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jumlah kontak dengan orang-orang penting untuk meningkatkan kesadaran akan proses mediasi yang inklusif. ▶ Berkas pelatihan dan pembekalan, Mediator Swiss merasa siap untuk mengatasi isu-isu terkait gender dalam mediasi dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh. 	FDFA

Kotak 8: Rencana Aksi Nasional Sri Lanka 2023–2027

Indikator di dalam Rencana Aksi Nasional Sri Lanka bersifat spesifik, mencakup berbagai tingkatan di kepolisian, dan menjelaskan cara-cara memverifikasi. Selain itu, indikator tersebut menetapkan dengan jelas tanggung jawab lembaga-lembaga pelaksana dan juga menunjuk lembaga-lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk memonitor capaian. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam perekrutan dan retensi petugas kepolisian perempuan.

Kepolisian Utama	Indikator	Sama-sama Verifikasi	Lembaga Pelaksana Utama	Aktor Eksternal Negara	Aktor Eksternal Non-Negara	Ekstensi Waktu	Lembaga Monitoring	Asas/Prinsip
2.12 Memastikan bahwa petugas kepolisian perempuan direkrut secara memadai, dan ditempatkan di seluruh kantor polisi, dan memastikan bahwa petugas kepolisian perempuan tetap bertugas dan diberi peluang yang sama dalam hal promosi dan kegiatan pembinaan kepolisan.	<ul style="list-style-type: none"> # petugas kepolisian perempuan yang direkrut. % petugas kepolisian perempuan yang ditempatkan di seluruh kantor polisi, dan # petugas kepolisian perempuan yang bertugas di 3 jabatan tertinggi kepolisian # suksesi yang dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan petugas kepolisian perempuan yang direkrut selama 2023 sampai dengan 2027 # suksesi yang dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan petugas kepolisian perempuan yang telah bertugas selama lebih dari 5, 10, 15, 20, 25 tahun. 	Komisi Kepolisian Sri Lanka	<ul style="list-style-type: none"> Komisi Layanan Kepolisian Komisi Kepolisian Kepolisian Sri Lanka Kementerian Keamanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Komisi Layanan Kepolisian Akademi Kepolisian Sri Lanka Kementerian Kehakiman, Layanan Sosial, dan Reformasi Kelembagaan Kementerian Layanan Perempuan, Anak, dan Pemberdayaan Sosial 	Lembaga Disabilitas	Jan 2023-Agt 2025	Komisi Kepolisian Nasional Sri Lanka	Akan dikembangkan

3. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi

Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi idealnya dimulai bersamaan dengan penyusunan rencana aksi nasional untuk memastikan monitoring yang berkelanjutan dan real-time. Penyusunan sejak awal memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan prioritas rencana aksi nasional. Anggaran, personel, dan dukungan teknis dapat dialokasikan terlebih dahulu, sehingga mencegah potensi penundaan dan keterlambatan di kemudian hari.

Perencanaan sejak awal dapat mengidentifikasi pengumpulan data yang dibutuhkan dan potensi tantangan yang akan dihadapi. Perencanaan sejak awal akan membantu memastikan bahwa mekanisme pengumpulan data sudah ada setelah rencana aksi nasional diluncurkan, sehingga menghindari penundaan dalam pengumpulan informasi penting. Perencanaan awal juga mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan utama sejak awal; membangun kepemilikan, komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memonitor hasil; dan dapat memberikan umpan balik. Pembelajaran dan pengetahuan yang muncul dapat menjadi masukan bagi penyesuaian rencana aksi nasional secara real-time, sehingga meningkatkan kemampuan adaptasi dan efektivitas.

Sejumlah negara dan organisasi regional memiliki pilar khusus mengenai koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi dalam rencana aksi nasional mereka. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa pencapaian akan dilacak dan dilaporkan dengan akurat, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berikut (lihat Kotak 9 dan 10 untuk contohnya).

- Fokus pada indikator hasil: Kapasitas pemantauan yang terbatas menjadikan indikator hasil lebih ditekankan daripada indikator keluaran. Indikator hasil lebih selaras dengan tujuan keseluruhan rencana aksi nasional dan memberikan perspektif pada tingkat yang lebih tinggi.
- Selaras dengan tujuan tertentu: Setiap indikator harus dikaitkan langsung dengan tujuan tertentu di dalam rencana aksi nasional untuk memperkuat hubungan antara aksi dan hasil yang diinginkan.
- Pemahaman yang informatif: Indikator harus memberikan data yang berharga dan informatif yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai pencapaian implementasi. Ini akan berguna bagi para pengambil kebijakan dan pengambil keputusan untuk membuat keputusan dan adaptasi yang tepat jika diperlukan.
- Pelacakan sederhana: Indikator harus menawarkan cara yang mudah diukur untuk melacak pencapaian. Pemilihan indikator harus mempertimbangkan keberadaan sumber data reguler.
- Pengukuran yang konsisten: Pilih indikator yang dapat diukur secara konsisten dari waktu ke waktu, sehingga pelacakan pencapaian dapat dipertanggungjawabkan.
- Menangkap kompleksitas: Indikator harus mencakup aspek-aspek perubahan yang rumit dan kompleks yang ingin dicapai oleh rencana aksi nasional.
- Pertimbangkan biaya: Saat memilih indikator, pertimbangkan biaya pengukurannya, dan harus seimbang antara indikator yang informatif dan indikator yang praktis untuk diukur.
- Indikator uji silang: Lakukan uji silang terhadap indikator pilihan Anda dengan kerangka kerja global dan regional yang relevan, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Aksi Regional, untuk mengidentifikasi indikator-indikator umum. Uji silang ini akan memudahkan pelaporan dan memastikan konsistensi.

- Harmonisasikan dengan sistem pemerintahan: Pastikan indikator yang dipilih selaras dengan sistem monitoring dan evaluasi pemerintah yang sudah ada. Jika pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan berbasis kegiatan, pertimbangkan untuk mengintegrasikan indikator hasil ke dalam struktur pemerintahan yang ada daripada membuat kerangka kerja tersendiri.
- Peningkatan kapasitas: Jika diperlukan, peningkatan kapasitas pemerintah dalam monitoring dan evaluasi bisa dilakukan. Pelatihan dan dukungan dapat meningkatkan kemampuan untuk memonitor dan melaporkan indikator secara efektif.
- Mengadopsi pendekatan “less is more (lebih sedikit itu lebih baik),” terhadap indikator. Tentukan angka dalam indikator dapat dicapai dan mencerminkan esensi pencapaian. Memilih indikator dengan baik akan membantu monitoring dan pelaporan yang lebih efektif, dan mengurangi beban tim monitoring dan evaluasi pemerintah.

Menyelaraskan monitoring dan pelaporan nasional dengan rencana regional.

Setiap rencana monitoring dan evaluasi nasional harus sesuai dengan tujuan menyeluruh rencana regional untuk memberikan panduan yang jelas mengenai implementasi dan mendorong strategi berbasis bukti. Rencana monitoring dan evaluasi harus menjadi tool dinamis yang membantu menjaga semua pemangku kepentingan tetap berada pada jalur untuk mencapai tujuan nasional dan regional yang saling melengkapi. Rencana tersebut harus berkontribusi pada pengambilan keputusan berbasis bukti dengan memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai hasil dari aksi, sehingga meningkatkan kredibilitas proses penyelarasan.

Indikator yang mendasari mandat kelembagaan

Indikator harus selaras dengan mandat dan kegiatan kementerian, direktorat, dan lembaga terkait agar dapat menangkap secara akurat keluaran dan kontribusi spesifik dari masing-masing lembaga, serta mempertimbangkan dampak yang lebih luas dan mencakup berbagai bidang. Sesi gabungan antara staf program/kebijakan dan staf monitoring dan evaluasi dari berbagai kementerian dapat mendorong kolaborasi dan berfungsi sebagai forum yang bermanfaat untuk meninjau, mengevaluasi, dan meningkatkan indikator yang dipilih.

Pastikan adanya informasi kualitatif

Menetapkan indikator adalah salah satu aspek dari proses monitoring yang lebih luas. Meskipun indikator tersebut memberikan informasi yang penting, namun indikator belum memberikan gambaran yang lengkap. Informasi kualitatif dari proyek, diskusi dan upaya kolaboratif berkontribusi pada pemahaman holistik mengenai dampak dari rencana aksi nasional. Sumber data kuantitatif dan kualitatif harus digunakan untuk menggabungkan informasi yang terukur dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman subjektif para pemangku kepentingan.

Kotak 9:

Rencana Aksi Nasional Yordania 2018–2021

- **Pembentukan sekretariat:** Sebuah sekretariat di Komite Nasional Yordania untuk Perempuan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi nasional, dengan dukungan dari UN Women dan pendanaan dari Pemerintah Finlandia.
- **Kerangka monitoring dan evaluasi:** Kerangka kerja sistematis dikembangkan berdasarkan pendekatan partisipatif nasional, yang melibatkan semua pihak dalam implementasi kegiatan rencana aksi nasional. Kerangka kerja ini mencakup indikator SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, and Time Bond/ Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Masuk akal, dan Batasan waktu) untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis, hasil, dan keluaran.
- **Tanggung jawab dan pengumpulan data:** Kerangka kerja ini menetapkan entitas yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengumpulan data yang relevan untuk indikator kinerja. Kerangka kerja ini juga menentukan frekuensi pengumpulan data.
- **Pelaporan pencapaian:** Pihak pelaksana diharapkan bekerja sama dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian inisiatif yang ditugaskan kepada mereka. Setiap pihak pelaksana harus menyerahkan laporan pencapaian secara berkala kepada focal point pusat yang bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi rencana secara keseluruhan.

Kotak 10:

Rencana Aksi Nasional ketiga Irlandia 2019–2024

Kerangka monitoring dan evaluasi rencana aksi nasional Irlandia terdiri dari beberapa komponen.

- **Dewan pengawas:** Dewan pengawas bertugas memastikan koordinasi dan akuntabilitas selama implementasi.
- **Kerangka monitoring:** Kerangka monitoring yang komprehensif menampilkan indikator-indikator spesifik dan terukur yang melacak aspek kuantitatif dan kualitatif kemajuan, termasuk kegiatan dan hasil, dengan fokus pada penetapan baseline untuk pelacakan yang efektif.
- **Evaluasi eksternal:** Konsultan independen melakukan tinjauan tengah semester pada tahun 2021, yang memandu penyesuaian rencana untuk dua tahun terakhir. Evaluasi dilakukan pada rencana aksi nasional ketiga untuk menilai pencapaian berbagai rencana.
- **Keselarasn dengan CEDAW:** Rencana aksi nasional ini sejalan dengan pelaporan CEDAW dan Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review--UPR) di Irlandia, dan masyarakat sipil didorong untuk melaporkan komitmen tersebut berdasarkan Rekomendasi Umum 30 Komite CEDAW.
- **Penyelarasan dengan kebijakan nasional:** Kegiatan dan indikator rencana aksi nasional diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan, migrasi, kesehatan antar budaya, dan penganggaran responsif gender.
- **Risiko dan asumsi:** Rencana tersebut mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan, seperti dukungan politik dan alokasi anggaran. Risiko, seperti keterbatasan sumber daya dan keterlibatan pemangku kepentingan, ditangani untuk memastikan tujuan rencana tercapai.

ASESMEN MANDIRI

- 1. Tinjauan tujuan rencana aksi nasional dan tujuan strategis regional**
 - Apakah kita memahami bagaimana program dan aksi yang dirinci dalam rencana aksi nasional berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Rencana Aksi Regional?
 - Apakah ada ketidaksesuaian atau kesenjangan antara rencana nasional dan regional yang perlu diatasi?
- 2. Penetapan tujuan yang jelas dan spesifik**
 - Sudahkah kita mengidentifikasi tujuan spesifik dalam rencana aksi nasional yang selaras dengan tujuan strategis Rencana Aksi Regional?
 - Apakah tujuan tersebut diartikulasikan dengan jelas dan tidak multitafsir?
- 3. Pergeseran dari keluaran (output) ke hasil (outcome)**
 - Apakah tujuan tersebut selaras dengan efektivitas rencana aksi nasional yang lebih luas, dan berkontribusi terhadap dampak Rencana Aksi Regional secara keseluruhan?
 - Apakah indikator-indikator tersebut menampilkan keluaran yang dapat diukur serta perubahan kualitatif dan peningkatan hasil-hasil masyarakat?
- 4. Menghindari potensi distorsi**
 - Apakah tujuan yang dipilih seimbang, menghindari penekanan berlebihan pada satu aspek yang mengorbankan aspek lainnya?
 - Apakah tujuan tersebut dirancang untuk menghindari potensi trade-off negatif, seperti mencapai target numerik namun mengabaikan kualitas hasilnya?
 - Apakah masukan dan perspektif dari beragam pemangku kepentingan telah dipertimbangkan untuk menghindari distorsi yang tidak disengaja?
- 5. Penyelarasan dan adaptasi yang berkelanjutan**
 - Apakah mekanisme telah ditetapkan untuk peninjauan rutin dan penyesuaian tujuan dengan kebutuhan dan konteks yang terus berkembang?
 - Apakah ada ketentuan untuk menyesuaikan tujuan berdasarkan laporan pencapaian, evaluasi, dan temuan konsultasi?
 - Apakah ada rencana untuk mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait penyesuaian tujuan rencana aksi nasional yang sejalan dengan Rencana Aksi Regional?

4. 4. Menyusun Mekanisme Monitoring dan Pelaporan

Mekanisme kelembagaan untuk memonitor pencapaian rencana aksi nasional sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas. Konfigurasi potensial bersifat serbaguna, mencakup gugus tugas atau komite antarlembaga yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil.

Mekanisme pemantauan dapat ditempatkan di dalam struktur pemerintahan yang ada atau badan hukum yang dibentuk, atau berfungsi secara mandiri.

Untuk memastikan pengawasan yang efektif, mekanisme ini memperkuat akuntabilitas monitoring di seluruh lingkup rencana aksi nasional. Menunjuk seorang koordinator politik dan administratif dapat membantu menyelaraskan upaya berbagai aspek, mengkonsolidasikan informasi dan memfasilitasi komunikasi secara internal dan eksternal.

Mekanisme pelaporan untuk rencana aksi nasional harus mudah digunakan, terstruktur dengan baik, ada peran yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan kelancaran koordinasi. Mekanisme tersebut harus menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengumpulan, penyerahan, analisis, dan pelaporan data. Juga mencakup pembagian peran untuk memfasilitasi sesi refleksi dan mendokumentasikan contoh-contoh praktis.

Durasi rencana aksi nasional harus mempengaruhi frekuensi pengumpulan data, termasuk kapan data hasil, jangka menengah, dan keluaran akan dikumpulkan. Menentukan interval pelaporan membantu memastikan pengiriman data yang konsisten dan tepat waktu. Menyelaraskan interval pelaporan dengan siklus yang ada, seperti yang diuraikan dalam CEDAW atau kerangka kerja terkait lainnya, mendukung konsistensi dan ketepatan waktu dalam penyerahan data.

Penggunaan formulir yang sederhana dan terstandarisasi untuk penyampaian data memudahkan pelaksana dan pemangku kepentingan untuk melaporkan pencapaian dan temuan. Idealnya, formulir harus terintegrasi dengan format yang sudah ada dan digunakan oleh kementerian terkait. Memasukkan bagian khusus mengenai implementasi rencana aksi nasional ke dalam format yang ada dapat mencegah duplikasi. Baik formulir berbasis kertas atau online, formulir tersebut harus ditentukan berdasarkan apa yang paling sesuai dengan konteks nasional dan praktik pelaporan. Alat yang mudah digunakan untuk penyimpanan dan analisis data, seperti Google Forms dan Excel spreadsheets, mudah diakses dan familier bagi banyak orang, serta dapat menyederhanakan pengelolaan data.

Mengelola keterbatasan data terkait pemilahan berdasarkan jenis kelamin

Jika pemilahan jenis kelamin tidak lengkap dalam data yang dikumpulkan oleh pemerintah, maka perlu melakukan hal-hal berikut.

- **Peningkatan kesadaran dan pelatihan:** Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan sesi pelatihan bagi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pelaporan data. Pastikan mereka memahami pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk efektivitas rencana aksi nasional dan keselarasan dengan komitmen internasional seperti CEDAW. Berikan panduan tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data tersebut.
- **Format pelaporan yang mudah digunakan:** Membuat format pelaporan yang terstandarisasi dan mudah digunakan sehingga mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk memasukkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam laporan rutin mereka, sehingga menjadikannya sebagai praktik rutin.
- **Jaringan data champions:** Membangun jaringan “data champions” di lembaga pemerintah yang mengadvokasi data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan berbagi praktik terbaik di antara rekan kerja.
- **Kolaborasi dengan masyarakat sipil:** Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil setempat untuk mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin melalui survei komunitas atau kegiatan penjangkauan, dan memanfaatkan jaringan dan keahlian mereka.

- **Tinjauan dan umpan balik rutin:** Melakukan tinjauan berkala terhadap proses pengumpulan data dan meminta umpan balik dari anggota staf untuk mengidentifikasi hambatan terhadap pemilahan berdasarkan jenis kelamin. Umpan balik ini digunakan untuk menyempurnakan dan meningkatkan prosedur pengumpulan data.
- **Kerangka hukum dan kebijakan:** Memastikan adanya kerangka hukum dan kebijakan nasional untuk mendukung pengumpulan dan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Jika memungkinkan, perlu dibuat perubahan peraturan yang ada untuk memperkuat pentingnya pengumpulan data sensitif gender.

Melengkapi data kuantitatif

Meningkatkan mekanisme pelaporan dengan mengintegrasikan contoh-contoh praktis dan data kuantitatif. Peningkatan mekanisme pelaporan tersebut melibatkan penggabungan indikator dan angka numerik dengan studi kasus kualitatif. Studi kasus membantu menafsirkan tren yang diamati dalam data, menambah konteks dan kedalaman. Studi kasus dapat menyoroti dampak proyek terhadap kelompok rentan, menunjukkan kontribusi mitra, dan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai dampak lokal.

Mekanisme pelaporan yang komprehensif tidak hanya mengumpulkan data secara efektif namun juga mendorong diskusi yang bermakna, pengambilan keputusan yang tepat, dan perbaikan berkelanjutan atas inisiatif rencana aksi nasional. Proses pelaporan menjadi upaya kolaboratif yang mendorong perubahan positif dan mencapai tujuan rencana aksi.

MEMBENTUK MEKANISME KELEMBAGAAN UNTUK MONITORING: ASESMEN MANDIRI

1. Tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas

- Apakah sudah ada pembagian yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mekanisme kelembagaan untuk memonitor pencapaian rencana aksi nasional?
- Apakah jelas di mana letak akuntabilitas monitoring?

2. Pengawasan yang efektif

- Apakah peran penting mekanisme kelembagaan dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap implementasi rencana aksi nasional telah diketahui?
- Apakah mekanisme ini dilengkapi dengan baik untuk mendukung keseluruhan rencana dan sejalan dengan visi Rencana Aksi Regional yang lebih luas?

3. Koordinasi dan komunikasi

- Apakah koordinator politik dan administratif telah ditunjuk untuk menyelaraskan upaya, mengkonsolidasikan informasi, dan memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal?
- Apakah koordinator berpengalaman dalam menangani berbagai macam tugas dan membina kolaborasi yang efektif?
- Apakah koordinator memahami pentingnya keselarasan dengan prinsip dan tujuan Rencana Aksi Regional?
- Dapatkah koordinator secara efektif melaporkan pencapaian rencana nasional di tingkat ASEAN dan berkontribusi terhadap monitoring regional?

5. Pentingnya memonitor umpan balik dalam proses kebijakan

Pentingnya monitoring lebih dari sekadar penilaian; monitoring penting dalam proses kebijakan. Monitoring mendorong introspeksi mendalam, yang dalam introspeksi tersebut mengajukan pertanyaan kritis adalah kuncinya. Strategi apa yang membuahkan hasil positif? Dimana saja perbaikan yang diperlukan? Proses ini dapat memberikan umpan balik yang mengungkap seluk-beluk yang mendorong keberhasilan dan tantangan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membantu merancang strategi adaptif.

Monitoring memberdayakan pihak berwenang dengan data substansial dan praktik terbaik yang mendukung kebijakan di tingkat nasional dan lokal. Pemahaman ini mendorong advokasi persuasif untuk proyek atau tema tertentu. Saat menghadapi pihak yang skeptis atau pemangku kepentingan, bukti ini dapat membantu mengartikulasikan keputusan dengan meyakinkan. Selain itu, monitoring membantu memetakan arah kebijakan di masa depan berdasarkan peluang yang ada dan tantangan yang muncul. Terlibat dalam proses ini dengan tujuan strategis dapat meningkatkan secara signifikan komitmen terhadap keberlanjutan, bahkan menarik dukungan dari donor yang memiliki visi yang sama untuk perubahan positif di lapangan.

ASESMEN MANDIRI TERKAIT UMPAN BALIK DALAM PROSES KEBIJAKAN

1. Integrasi umpan balik dalam penyusunan kebijakan

- Apakah terdapat mekanisme pelaporan reguler dalam sistem monitoring dan evaluasi yang memberikan informasi terkini kepada pengambil keputusan mengenai pencapaian, hasil, dan tantangan yang dihadapi selama implementasi rencana aksi nasional?
- Bagaimana pembaruan ini disesuaikan untuk memfasilitasi penyesuaian kebijakan berdasarkan informasi real-time?

2. Adaptasi kebijakan yang didorong oleh umpan balik

- Apakah ada protokol yang ditetapkan untuk menerjemahkan umpan balik yang dikumpulkan melalui sistem monitoring dan evaluasi ke dalam perubahan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga memastikan bahwa rencana aksi nasional tetap responsif terhadap dinamika perubahan?

3. Pengambilan keputusan kolaboratif berdasarkan umpan balik

- Apakah pendekatan kolaboratif tetap dijaga ketika umpan balik yang dikumpulkan dari sistem monitoring dan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan dan pakar terkait dalam pengambilan keputusan?
- Bagaimana diskusi umpan balik diintegrasikan ke dalam sesi tinjauan kebijakan untuk memanfaatkan beragam perspektif dan meningkatkan efektivitas kebijakan?

4. Mengatasi kebutuhan yang muncul dari umpan balik

- Apakah sistem pemantauan dan evaluasi dirancang untuk menangkap kebutuhan-kebutuhan yang muncul dan tantangan-tantangan yang tidak terduga yang teridentifikasi selama implementasi, dan bagaimana kebutuhan dan tantangan tersebut ditangani di dalam revisi kebijakan?
- Apakah terdapat mekanisme yang dapat dengan cepat mengatasi isu-isu kritis yang disoroti dalam proses umpan balik untuk mencegah potensi hambatan?

6. Menyediakan sumber daya untuk rencana monitoring dan evaluasi

Agar rencana monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif, diperlukan sumber daya yang tepat dan orang yang tepat. Sebuah komite yang berdedikasi harus mengawasi rencana tersebut dan mengawasi staf terlatih di departemen terkait. Tanggung jawab yang jelas harus ditetapkan dan dapat dimasukkan dalam uraian tugas dan pedoman departemen. Pelatihan pengumpulan data, analisis, pelaporan dan standar yang diperlukan harus memastikan pendekatan yang konsisten. Penting memiliki prosedur yang jelas untuk pengelolaan data termasuk pembaruan rutin untuk memastikan keakuratan dan relevansi.

Strategi kementerian dapat melakukan monitoring dan evaluasi sumber daya secara efektif sebagai berikut:

- 1. Memasukkan aksi monitoring dan evaluasi yang spesifik ke dalam rencana aksi nasional:** Langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti terkait dengan monitoring, pelaporan, dan koordinasi harus menguraikan apa yang diharapkan dari masing-masing kementerian terkait pengumpulan data, frekuensi pelaporan, dan kolaborasi dengan badan-badan pemerintah lainnya. Ketika tanggung jawab ini dirinci dalam rencana aksi nasional, kementerian terkait akan lebih mudah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi komitmen mereka.
- 2. Anggaran untuk pengumpulan dan analisis data:** Kegiatan monitoring dan evaluasi seringkali memerlukan sumber daya keuangan untuk pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Kementerian terkait harus mengalokasikan dana dalam anggaran mereka secara khusus untuk tujuan tersebut. Pengalokasian dana dapat mencakup investasi pada teknologi, alat, dan pelatihan yang diperlukan untuk pengelolaan data yang efektif.
- 3. Peningkatan kapasitas:** Meningkatkan kapasitas kementerian terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi merupakan investasi yang sangat penting. Mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan staf yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan pelaporan sehingga mereka dapat melaksanakannya secara efektif.
- 4. Mekanisme umpan balik:** Menerapkan mekanisme umpan balik dalam rencana aksi nasional untuk mendapatkan masukan dari kementerian mengenai kebutuhan sumber daya untuk monitoring dan evaluasi. Tinjauan dan evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan sumber daya tambahan atau penyesuaian.
- 5. Advokasi untuk alokasi sumber daya:** Kementerian terkait dapat mengadvokasi sumber daya untuk monitoring dan evaluasi dengan membangun argumentasi pentingnya kegiatan tersebut bagi keberhasilan rencana aksi nasional. Menyajikan bukti dampak monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan rencana aksi nasional dapat menjadi argumen yang meyakinkan untuk mendapatkan dana yang diperlukan.

7. Tantangan yang berulang dan solusi efektif dalam monitoring dan pelaporan

Bukti global menunjukkan adanya tantangan berulang dalam monitoring dan pelaporan rencana aksi nasional. Tantangan tersebut dirinci pada Gambar 11 beserta beberapa solusi paling efektif untuk mengatasi potensi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, mengatasi tantangan dalam monitoring dan pelaporan rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan memerlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan komitmen politik, monitoring berbasis data, dan penguatan kelembagaan.

Gambar 11. Beberapa tantangan berulang dalam monitoring dan pelaporan

Tantangan | **Sumber daya yang terbatas**



Mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk memastikan proses monitoring yang kuat, yang mencakup personel terampil, peralatan teknis, dan dukungan anggaran

Tantangan | **Sentralisasi**



Menetapkan focal point yang jelas yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan proses monitoring untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas.

Tantangan | **Koordinasi yang kurang jelas**



Mengembangkan strategi komunikasi yang efisien yang mengidentifikasi informasi penting, menugaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menguraikan saluran sosialisasi yang efektif.

Tantangan | **Kurangnya pembelajaran dalam pelaporan**



Membangun platform yang mendorong kolaborasi lintas departemen dan memungkinkan mitra, termasuk masyarakat sipil, untuk berbagi praktik terbaik, sehingga menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan.

Tantangan | **Pengumpulan data yang rumit**



Menyederhanakan prosedur pengumpulan data untuk memastikan bahwa waktu dan upaya yang diinvestasikan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Memberikan pelatihan komprehensif untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data dan komunikasi.

Tantangan | **Indikator yang kompleks**



Menempatkan indikator kompleks pada mandat dan kegiatan masing-masing lembaga akan menjadikan indikator tersebut relevan dan menunjukkan kontribusi langsung indikator tersebut terhadap tujuan yang lebih luas.

Tantangan | **Kurangnya kejelasan dalam menerjemahkan kegiatan rencana**



Memprioritaskan implementasi kebijakan dengan mengidentifikasi hambatan implementasi. Mengalihkan fokus dari monitoring yang berorientasi pada keluaran, ke penilaian dampak dari aksi yang direncanakan

Tantangan | **Asesmen dampak yang kurang memadai**



Melengkapi pengukuran kuantitatif dengan indikator kualitatif untuk menilai perubahan yang diinginkan secara holistik, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampaknya.

8. Menyesuaikan kerangka monitoring dan evaluasi yang ada dengan prinsip-prinsip regional

Poin-poin aksi berikut ini khususnya berkaitan dengan negara-negara yang telah menetapkan rencana aksi nasional dengan sistem monitoring dan evaluasi yang disusun dengan baik dan dapat disesuaikan. Beberapa saran untuk membantu menyelaraskan dengan Rencana Aksi Regional.

- **Integrasi indikator strategis:** Mengidentifikasi indikator kinerja utama dalam kerangka monitoring dan evaluasi yang ada yang dapat diselaraskan secara strategis dengan tujuan regional. Mengintegrasikan indikator regional dengan indikator nasional yang ada saat ini.
- **Pelacakan paralel:** Menerapkan sistem pelacakan paralel dalam kerangka yang ada untuk memonitor pencapaian khususnya terkait dengan rencana regional. Sistem ini memungkinkan pelacakan khusus tanpa merombak keseluruhan sistem.
- **Pelaporan yang berfokus pada Rencana Aksi Regional:** Menyusun laporan khusus atau bagian tertentu dalam struktur pelaporan yang ada. Laporan tersebut dapat menampilkan tantangan dan pencapaian terkait Rencana Aksi Regional dengan tetap menjaga kerangka pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.
- **Lokakarya keterlibatan pemangku kepentingan:** Menyelenggarakan lokakarya atau kelompok kerja dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencari cara-cara inovatif dalam mengumpulkan data terkait Rencana Aksi Regional dalam proses monitoring dan evaluasi yang ada tanpa mengganggu secara signifikan sistem yang ada saat ini.
- **Pengumpulan data dengan tujuan ganda:** Mengoptimalkan proses pengumpulan data yang ada dengan memodifikasi data point untuk memenuhi kerangka monitoring dan evaluasi yang ada serta persyaratan regional. Pengoptimalan tersebut meminimalkan duplikasi.
- **Tim lintas fungsi:** Membentuk tim lintas fungsi yang fokus pada pengumpulan data dan pelaporan Rencana Aksi Regional sambil berkolaborasi dengan tim monitoring dan evaluasi yang ada. Pembentukan tim lintas fungsi tersebut memastikan pendekatan yang ditargetkan.
- **Tinjauan kerangka monitoring dan evaluasi secara berkala:** Menjadwalkan peninjauan berkala terhadap kerangka kerja untuk mengidentifikasi peluang penyederhanaan dan pengoptimalan integrasi data terkait Rencana Aksi Regional tanpa membebani sistem secara berlebihan.
- **Fleksibilitas dalam adaptasi:** Merancang kerangka monitoring dan evaluasi yang memiliki kemampuan beradaptasi untuk mengakomodasi prioritas regional yang terus berkembang atau tantangan regional yang muncul, dengan memastikan bahwa kerangka kerja tersebut tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan.
- **Bercerita:** Gunakan teknik bercerita (storytelling) untuk menyajikan data mengenai Rencana Aksi Regional dalam laporan yang ada, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

9. Biaya dan menyusun anggaran untuk rencana aksi nasional

Penentuan biaya untuk rencana aksi nasional harus dimulai ketika kerangka monitoring dan evaluasi telah diselesaikan, peran dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan jelas, dan struktur koordinasi dan implementasi telah ditetapkan. Penetapan biaya dan penganggaran dalam rencana ini memfasilitasi penerjemahan standar perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam aksi yang dapat dilaksanakan, terukur, dan akuntabel, yang selaras dengan prioritas nasional (Kotak 11).⁷² Langkah tersebut menjadi masukan bagi strategi penggalangan dana dan membantu memperoleh komitmen anggaran yang konkret dari pemerintah.⁷³ Berbagai tool penetapan biaya harus dipahami dengan jelas oleh pejabat pelaksana.⁷⁴

Kotak 11:

Pentingnya anggaran khusus untuk rencana aksi nasional

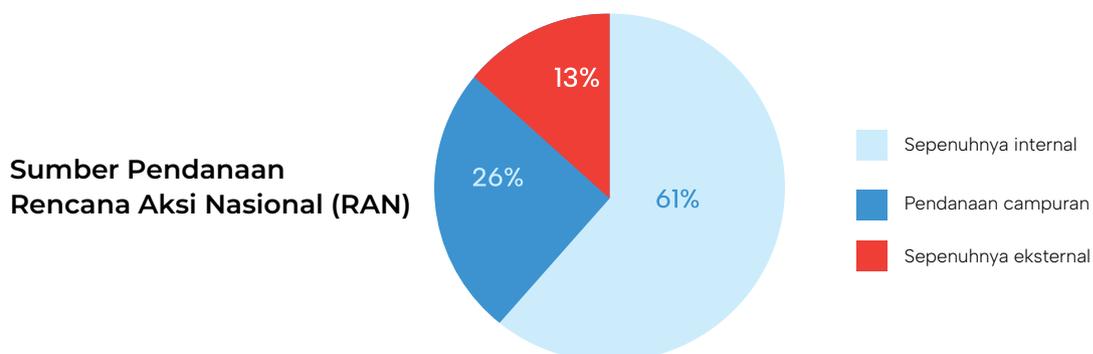
Pada tahun 2017, dari 68 negara yang memiliki rencana aksi nasional, hanya 16 negara yang memiliki anggaran khusus. Sekretaris Kementerian Perdamaian dan Rekonstruksi Nepal, Gajendra Kumar Thakur, memberikan pernyataan yang menarik pada lokakarya penetapan biaya dan penganggaran rencana aksi nasional pada tahun 2017, dengan mengatakan, "Rencana tanpa anggaran seperti mobil tanpa bahan bakar!"

Sumber: GNWP, 2017b.

Opsi pertama dukungan finansial terhadap program-program aksi nasional utama adalah dengan mengintegrasikannya ke dalam rencana dan anggaran kementerian, departemen, dan lembaga publik lainnya yang menangani isu-isu perempuan, perdamaian, dan keamanan. Opsi ini akan meningkatkan kepemilikan nasional dan memberikan kepastian mengenai sumber daya yang tersedia selama anggaran tahunan instansi terkait mempunyai dana yang diperlukan. Alokasi sumber daya keuangan merupakan indikator yang baik dalam menilai pelaksanaan rencana.⁷⁵ Titik masuk untuk menyelaraskan dengan alokasi anggaran pemerintah memerlukan analisis dan perencanaan yang cermat serta interaksi reguler dengan pejabat terkait

Berdasarkan survei terhadap 23 Negara Anggota PBB, Gambar 12 menunjukkan rincian sumber pendanaan untuk rencana aksi nasional.⁷⁶

Gambar 12: Komposisi pendanaan rencana aksi nasional pada umumnya



Beberapa pertanyaan kunci dalam kegiatan penetapan biaya adalah:

- Apakah kegiatan ini dapat didanai oleh kementerian tertentu?
- Jika kementerian nasional tidak mampu membiayai kegiatan ini, dapatkah sumber pendanaan alternatif diatur?

Menghitung biaya salah satu bidang prioritas rencana aksi nasional dimulai dengan memilih keluaran, kegiatan terkait, biaya, serta perkiraan biaya satuan (unit cost) untuk setiap item. Setelah biaya satuan dan jumlah satuan yang diinginkan telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam format pada Tabel 9, maka secara otomatis akan menghitung total biaya dalam mata uang lokal dan mata uang lainnya (misalnya dolar Amerika Serikat atau euro). Selain itu, informasi mengenai lembaga pelaksana utama yang bertanggung jawab atas kegiatan tertentu dan sumber pendanaan untuk setiap kegiatan perlu dicantumkan di dua kolom terakhir.⁷⁷

Tabel 9: Penetapan biaya satuan kegiatan untuk dimasukkan dalam anggaran

Satuan	Biaya satuan	Jumlah satuan	Total biaya (dalam mata uang lokal)	Konversi ke dolar AS	Total biaya dalam dolar	Persentase total biaya	Lembaga/kementerian/badan pelaksana	Sumber pendanaan yang diproyeksikan (nasional/internal/lainnya)

Poin Penting

Penetapan biaya merupakan pemeriksaan realitas dalam mempersiapkan anggaran yang komprehensif dan realistis untuk rencana aksi nasional. Tanpa mengidentifikasi biaya dan mendedikasikan sumber daya yang diperlukan, kegiatan tidak akan dilaksanakan dan rencana aksi nasional hanya akan menjadi rencana saja. Penetapan biaya membantu memastikan sumber daya khusus untuk implementasi, memprioritaskan kegiatan tertentu dan mengidentifikasi kesenjangan sumber daya serta hambatan yang ada atau potensi hambatan. Penetapan biaya mendorong kepemilikan dan akuntabilitas di antara seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan.

10. Mengidentifikasi sumber pendanaan inovatif

Pembiayaan yang inovatif dapat mendukung mobilisasi sumber daya untuk rencana aksi nasional. Salah satu pilihannya adalah dengan mengintegrasikan komponen inti penganggaran responsif gender ke dalam penyusunan anggaran rencana aksi nasional. Penganggaran responsif gender bukanlah upaya yang paralel. Penganggaran responsif melibatkan analisis gender terhadap anggaran untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dikumpulkan dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan peran khusus perempuan dan laki-laki.⁷⁸ Penganggaran responsif memerlukan pengumpulan data komprehensif yang terpilah berdasarkan jenis kelamin mengenai deliverable keuangan dan teknis.

Negosiasi dengan focal points di kementerian keuangan dan perencanaan pembangunan yang menangani reformasi manajemen sektor publik dapat mendorong penerapan penganggaran responsif gender dalam alokasi anggaran dan pelacakan pengeluaran untuk intervensi terhadap agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan. Konsultasi dengan lembaga-lembaga publik yang bertanggung jawab atas rencana pembangunan nasional, strategi pengentasan kemiskinan, dan kerangka pembiayaan nasional yang terintegrasi, di antara kerangka kebijakan lainnya, merupakan opsi tambahan untuk melembagakan alokasi rencana aksi nasional ke dalam anggaran kementerian, lembaga, dan institusi lainnya.

Beberapa sumber utama adalah sebagai berikut:

- Program rencana aksi nasional dimasukkan dalam perencanaan program perempuan, perdamaian, dan keamanan di organisasi-organisasi internasional besar
- Menyusun proposal program dan proyek berdasarkan kemitraan dengan penyandang dana sektor swasta
- Menyelenggarakan asesmen kebutuhan bersama dengan organisasi masyarakat sipil, dan mengajukannya kepada aktor-aktor nasional dan internasional untuk mendapatkan dukungan finansial
- Memanfaatkan pendanaan iklim untuk mendukung kelompok marginal yang terkena ancaman iklim
- Potensi pendanaan dari obligasi berdampak sosial dan pembangunan yang memanfaatkan modal swasta untuk mendanai proyek-proyek sosial, termasuk proyek-proyek yang terkait dengan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan,⁷⁹ serta instrumen keuangan Islam seperti sukuk
- Kerja sama Selatan-Selatan bagi negara-negara untuk berbagi keberhasilan pengetahuan, keterampilan, dan inisiatif
- Pajak hijau (green tax) untuk mendanai mitigasi dampak perubahan iklim dan isu-isu terkait yang mungkin mempengaruhi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan
- Obligasi diaspora untuk memobilisasi tabungan diaspora demi tujuan pembangunan⁸⁰
- Retribusi tiket pesawat untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan dalam rencana aksi nasional, sebuah modalitas yang telah memobilisasi lebih dari \$1,5 miliar untuk negara-negara seperti Benin, Kamerun, Mali, Mauritius dan Niger⁸¹
- Three-way matching fund yaitu donor mencocokkan kontribusi dari perusahaan, yayasan, dan organisasi lain, termasuk PBB⁸²

Kesimpulannya, ketika mempertimbangkan penyusunan rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, negara-negara anggota ASEAN harus berfokus pada peningkatan kesadaran akan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan dan menekankan pentingnya mengembangkan rencana aksi nasional di tingkat nasional. Saat menyusun rencana aksi nasional, penting untuk secara jelas menetapkan peran dan tanggung jawab kepada badan koordinasi yang memiliki misi yang sama dan menetapkan mekanisme untuk memastikan akuntabilitas para pelaksana. Selain itu, disarankan agar Rencana Aksi Nasional diperkuat dengan kerangka logis yang menguraikan hasil-hasil spesifik yang sejalan dengan RPA ASEAN tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil dan penciptaan kerangka monitoring dan pelaporan serta tools untuk implementasi. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa RAN berdampak besar mencakup anggaran yang secara komprehensif mencakup sumber daya finansial, manusia, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan secara efektif..

Mengoperasikan rencana aksi nasional

Setelah proses perencanaan rencana aksi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi, adopsi oleh pemerintah pusat, dan peluncuran resmi. Peluncuran resmi dilakukan untuk menunjukkan dimulainya upaya persiapan implementasi dan kegiatan terkait. Selanjutnya penting melakukan peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas di antara para pemangku kepentingan utama serta mendokumentasikan praktik-praktik dan pembelajaran yang menjanjikan selama implementasi untuk memperkuat pembelajaran dan menginformasikan intervensi di masa depan.

1. Mengesahkan rancangan rencana aksi nasional, mengadopsi, dan meluncurkannya

Setelah rancangan rencana aksi nasional selesai, kelompok kerja dapat bertemu dalam rangka:⁸³

- Meninjau tujuan dan kegiatan agar selaras dengan peraturan dan kebijakan nasional terkait Rencana Aksi Regional.
- Memastikan narasi sesuai dengan kerangka logisnya.
- Memastikan peran utama pihak-pihak yang bertanggung jawab selaras dengan mandat dan prioritas mereka.
- Memastikan apakah anggaran telah disusun dengan sumber daya yang memadai dan/atau selaras dengan anggaran yang ada dan alokasi sumber daya dari pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab.
- Mengesahkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang diusulkan, memastikan bahwa mekanisme tersebut realistis dan dapat diterapkan, indikator yang diusulkan dapat mencakup pekerjaan di berbagai entitas, dan data tersedia atau dapat dikumpulkan.

Setelah kelompok kerja meninjau dan menyetujui rancangan tersebut, segala upaya harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah melalui kementerian yang memimpin pelaksanaan Rencana Aksi Regional serta oleh semua pemangku kepentingan utama.

Peluncuran rencana aksi nasional bergantung pada masing-masing negara. Secara umum, peluncuran tersebut harus melibatkan pejabat senior pemerintah dan perwakilan dari berbagai kelompok target. Peluncuran tersebut harus memastikan adanya media dan sosialisasi kepada publik tentang hasil dan program utama, termasuk peningkatan kesadaran yang berkelanjutan mengenai pencapaian dan langkah-langkah ke depan.

Peluncuran juga dapat dilakukan dengan membuat selebaran dan poster dan didistribusikan oleh pemerintah dan NGO, dan dikirim ke sekolah, organisasi masyarakat, dan anggota masyarakat.

Upaya implementasi awal

Implementasi rencana aksi nasional sangat bergantung pada seberapa responsif rencana aksi tersebut terhadap realitas nasional.⁸⁴ Beberapa aksi yang direkomendasikan pada tahun pertama implementasi adalah:⁸⁵

 <p>Penunjukan resmi anggota struktur koordinasi dan implementasi untuk melaksanakan program.</p>	 <p>Pengembangan rencana implementasi yang disesuaikan yang secara resmi mengintegrasikan kegiatan prioritas ke dalam rencana kementerian-kementerian terpilih, dan yang mencakup sumber daya teknis dan sumber daya keuangan bagi para pejabat untuk menghasilkan momentum dan membangun kolaborasi.</p>	 <p>Menetapkan peran dan tanggung jawab aktor nasional dan lokal untuk melaksanakan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan.</p>	 <p>Pengembangan baseline untuk monitoring, pelaporan, dan evaluasi untuk mengukur kemajuan, termasuk pemetaan indikator yang telah ditetapkan untuk laporan lainnya. Sebagai contoh, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16.7 berhubungan langsung dengan pengembangan dan implementasi rencana aksi nasional.</p>
 <p>Pengembangan strategi mobilisasi sumber daya untuk memanfaatkan keuangan inovatif dan mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam alokasi sumber daya keuangan.</p>	 <p>Penggunaan dukungan teknis yang ditawarkan oleh ASEAN Gender Focal Points dan entitas spesifik lainnya tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan.</p>	 <p>Partisipasi dalam inisiatif unggulan ASEAN terkait Rencana Aksi Regional.</p>	 <p>Identifikasi advokasi utama yang relevan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk memastikan implementasi rencana aksi nasional yang praktis dan realistis.</p>

Beberapa kondisi yang terbukti bermanfaat bagi implementasi rencana aksi nasional yang efektif adalah:⁸⁶

 <p>Komitmen pemerintah tingkat tinggi</p>	 <p>Kemitraan yang erat dengan masyarakat sipil, komunitas akademis, dan organisasi regional dan multilateral</p>	 <p>Badan koordinasi antarlembaga (antarkementerian) yang efisien dan efektif</p>	 <p>Alokasi yang memadai dari anggaran nasional untuk aksi prioritas</p>
 <p>Prosedur akuntabilitas dengan indikator yang memadai untuk monitoring dan evaluasi</p>	 <p>Insentif positif dibuat untuk memotivasi orang-orang dengan kinerja tinggi pelaku tingkat tinggi dalam implementasi</p>	 <p>Pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan</p>	 <p>Kumpulan praktik baik untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan untuk disebarluaskan</p>

2. Meningkatkan kesadaran pentingnya RAN, menguatkan komitmen pemerintah dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan utama

Meningkatkan kesadaran sangatlah penting dalam menggalang dukungan untuk implementasi rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Kampanye pendidikan, forum publik, dan liputan media sangatlah penting. Dengan menyoroti kisah nyata perempuan yang terkena

dampak konflik, kita dapat menyampaikan suara mereka ke garis depan dan menekankan pentingnya melibatkan mereka dalam semua tahap perundingan perdamaian, pascakonflik, pembangunan perdamaian, dan proses menjaga perdamaian. Selain itu, keterlibatan dengan beragam pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan badan internasional sangatlah penting. Melalui kolaborasi dan dialog, jaringan dukungan yang kuat terhadap implementasi rencana aksi nasional dapat dibangun, memastikan bahwa hak-hak perempuan dan partisipasi bermakna dalam pembangunan perdamaian ditegakkan.

Salah satu pendekatan inovatif untuk membangkitkan minat dan memobilisasi dukungan adalah melalui penggunaan teknologi dan platform media sosial. Dengan memanfaatkan kekuatan komunikasi digital, organisasi dan individu dapat menjangkau khalayak luas dan menyebarkan informasi relevan mengenai hak-hak perempuan, dampak konflik terhadap perempuan, dan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan perdamaian.

Setelah peluncuran rencana aksi nasional, program peningkatan kesadaran dan penjangkauan akan membantu mensosialisasikan isu-isu utama di antara para mitra pelaksana.

Proses ini dapat berupa:

- Menyiapkan dialog atau diskusi kelompok terarah (FGD) di antara pejabat penting di tingkat pemerintahan sangat penting untuk keberhasilan Operasionalisasi
- Menyelenggarakan program pengembangan kapasitas bagi pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang

Menyelenggarakan debat publik, diskusi panel, dan pertemuan balai kota untuk memfasilitasi dialog tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Mendorong para pembuat kebijakan, perwakilan masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berbagi perspektif mereka mengenai manfaat rencana aksi nasional.

Berkolaborasi dengan lembaga akademis dan peneliti untuk melakukan studi, menyelenggarakan seminar, dan meluncurkan publikasi tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Menciptakan peluang bagi mahasiswa dan akademisi untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian dan menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya rencana aksi nasional.

Menugaskan atau melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan bukti mengenai hasil positif dari penerapan rencana aksi nasional. Berbagi temuan dan data melalui publikasi, laporan, dan infografis untuk menggambarkan pentingnya kebijakan dan tindakan responsif gender dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan.

Membangun kemitraan dengan organisasi internasional, aliansi regional, dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja di bidang perempuan, perdamaian, dan keamanan.

Berkolaborasi dalam inisiatif bersama, berbagi praktik terbaik, dan saling mendukung upaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi implementasi rencana aksi nasional.

Melibatkan influencer, aktivis, dan komunitas digital dapat membantu menciptakan diskusi online, memperkuat pesan, dan mendorong partisipasi dalam inisiatif. Selain itu, menggabungkan visual kreatif, video, dan konten interaktif dapat memikat audiens dan menginspirasi mereka untuk mengambil tindakan. Melalui cara-cara modern ini, kita dapat memperkuat suara perempuan yang terkena dampak konflik, membangkitkan rasa belas kasih, dan memobilisasi upaya kolektif menuju implementasi rencana aksi nasional tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan yang efektif.

Poin Penting

Komitmen politik yang berkelanjutan akan sangat menentukan implementasi rencana aksi nasional yang efisien dan efektif. Kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kinerja dan mempertahankan komitmen mitra pelaksana juga merupakan hal yang penting. Peningkatan kesadaran dan program pengembangan kapasitas yang rutin harus ditargetkan secara cermat kepada audiens yang berbeda-beda. Tinjauan rutin terhadap kegiatan-kegiatan ini akan membantu dalam membuat perubahan yang diperlukan dan memberikan masukan bagi intervensi di masa depan.

3. Mendokumentasikan praktik-praktik baik dan pembelajaran yang dipetik

Keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi rencana aksi nasional harus didokumentasikan untuk memperkaya pembelajaran dan memberikan masukan bagi intervensi di masa depan. Langkah-langkah untuk menganalisis data, merefleksikan, mempelajari dan menerapkan pembelajaran harus dimasukkan ke dalam implementasi dengan dukungan yang tepat. Dokumentasi mengenai praktik baik dan pembelajaran dapat diperoleh dari monitoring dan evaluasi.

Beberapa pertanyaan kunci yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan pengalaman adalah:

- Praktik baik apa yang menjamin koordinasi yang koheren dan kolaborasi lintas sektoral dalam implementasinya?
- Praktik baik dan pembelajaran apa yang muncul dari pengintegrasian gender ke dalam rencana dan operasi sektor keamanan?
- Informasi terbaik apa yang harus disertakan dalam mendokumentasikan praktik-praktik baik dan pembelajaran untuk disebarluaskan kepada pemangku kepentingan lainnya?
- Media apa yang paling efektif untuk menyebarkan informasi ini?
- Bagaimana informasi ini dapat memperkuat memori kelembagaan dan memberikan masukan bagi intervensi di masa depan?
- Bagaimana informasi tersebut dapat meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil, serta membangun kepercayaan dan komunikasi tentang pencegahan konflik, resolusi dan pemulihan dalam konteks nasional/lokal tertentu?
- Bagaimana studi kasus regional tentang penyertaan perspektif gender dalam isu-isu keamanan non-tradisional, termasuk perdagangan manusia, penanggulangan dan tanggapan bencana, perubahan iklim dan keadaan darurat kesehatan masyarakat, dapat disebarluaskan di tingkat nasional?

Pelajaran yang dipetik⁸⁷ dari implementasi rencana aksi nasional di berbagai belahan dunia dapat memberikan panduan bagi implementasi rencana aksi nasional. Contohnya antara lain:

- Mengkonsolidasikan aktor-aktor pemerintah yang sebelumnya jarang berkoordinasi, seperti kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian pemberdayaan perempuan, untuk menangani agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan.
- Mengintegrasikan elemen-elemen kunci dari rencana tersebut ke dalam kebijakan nasional dan proses perencanaan mengenai isu-isu perempuan, perdamaian dan keamanan; Pengintegrasian ini memperluas kepemilikan, meningkatkan implementasi dan menjamin pendanaan.

- Menggunakan rencana aksi nasional untuk melibatkan aktor-aktor pemerintah di berbagai tingkatan dan bekerja dengan masyarakat sipil untuk membangun kepercayaan dan komunikasi terkait masalah stabilitas dan keamanan.
- Memasukkan indikator kualitatif yang dapat melacak perubahan transformatif, dan menggunakan pelaporan yang berorientasi pada hasil dan informasi keuangan terperinci untuk memahami apakah tingkat investasi dalam rencana aksi nasional memberikan hasil yang positif.
- Memastikan analisis data, refleksi, pembelajaran, dan penerapan pembelajaran mendapat dukungan, monitoring, dan evaluasi yang tepat, dan tidak dilihat hanya sebagai alat akuntabilitas.
- Melaporkan dan menyebarkan cerita mengenai dampak rencana aksi nasional.

Kesimpulannya, untuk mengoperasionalkan rencana aksi nasional perdamaian dan keamanan perempuan secara efektif, penguatan kapasitas badan koordinasi WPS dan adanya pendanaan berkelanjutan sangatlah penting. Kurangnya pendanaan berkelanjutan merupakan hambatan besar bagi implementasi agenda WPS. Agar RAN menjadi efektif, diperlukan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan WPS, sumber pendanaan yang dapat diprediksi dan berkelanjutan, serta pengelolaan dan penelusuran dana yang tepat.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan antara lain keterlibatan dan partisipasi bermakna organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan, implementasi, dan monitoring rencana aksi nasional. Keterlibatan dan partisipasi ini akan membantu memastikan beragamnya perspektif dan rasa kepemilikan terhadap rencana tersebut.

Pertimbangan utama lainnya adalah penyusunan kerangka monitoring dan pelaporan yang selaras dengan kerangka monitoring dan pelaporan pemerintah yang ada untuk melacak pencapaian, mengidentifikasi pembelajaran yang dipetik, dan mengukur dampak rencana aksi nasional. Penyusunan tersebut memerlukan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, penetapan indikator, dan pemantauan berkala terhadap proses implementasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menyesuaikan strategi. Terakhir, penting untuk berinvestasi dalam peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah, pasukan keamanan, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini akan membantu memperkuat pemahaman mereka mengenai isu-isu gender, memungkinkan penerapan strategi responsif gender secara efektif, dan meningkatkan koordinasi antar aktor yang berbeda.



Glosarium

Lembaga: mengacu pada kemampuan dan kapasitas untuk terlibat dalam aksi di bawah kekuasaan dan kendali sendiri, menyadari secara penuh akan struktur dan norma sosial yang mungkin berpengaruh, membatasi atau membentuk aksi dan pilihan seseorang.⁸⁹ Dalam konteks perempuan, perdamaian, dan agenda keamanan, lembaga ini meningkatkan partisipasi setara dan keterlibatan penuh perempuan dalam seluruh upaya untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian dan keamanan.

Kekerasan seksual terkait konflik: mengacu pada pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, dan segala bentuk kekerasan seksual lain dengan tingkat keparahan serupa yang dilakukan terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan atau anak laki-laki yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik. Istilah ini juga mencakup perdagangan orang yang dilakukan dalam situasi konflik dengan tujuan kekerasan/eksploitasi seksual.⁹⁰

Sensitivitas konflik: berarti menilai secara hati-hati kemungkinan dampak negatif intervensi sambil mempertimbangkan dinamika konflik.

Gender: mengacu pada peran dan hubungan yang dibangun secara sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender umumnya dinyatakan dalam istilah maskulinitas dan feminitas, dan ditentukan secara budaya. Oleh karena itu, peran dan atribut berbasis gender berubah seiring berjalannya waktu dan bergantung pada konteks budaya. Gender tidak ditentukan oleh biologi namun dapat dipelajari; perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan diajari bahwa peran dan perilaku tertentu pantas menurut jenis kelamin mereka.⁹¹

Norma gender: adalah peraturan informal dan ekspektasi sosial bersama yang membedakan perilaku yang diharapkan berdasarkan gender. Meskipun spesifik dalam konteksnya, secara global, norma-norma gender sering kali menyatakan bahwa peran yang diharapkan dari perempuan adalah di ranah privat, seperti peran sebagai pengasuh, dan peran laki-laki di ranah publik, dalam pekerjaan berbayar, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.

Analisis gender: kerangka kerja dan metodologi untuk memandu pengumpulan informasi dan data serta analisisnya untuk lebih memahami hubungan antara perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak laki-laki sebagai individu, akses mereka terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, hak-hak mereka, serta kendala dan peluang yang mereka miliki dibandingkan satu sama lain.⁹²

Kekerasan berbasis gender: ditujukan terhadap individu atau sekelompok orang berdasarkan gendernya. Kekerasan berbasis gender mencakup kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta kekerasan terhadap laki-laki dan anak laki-laki.⁹³

Keseimbangan atau paritas gender: tindakan yang diambil untuk memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki secara penuh dan setara dalam lembaga dan pengambilan keputusan keamanan, misalnya dalam lembaga penegak hukum, militer, atau komite pengawasan parlemen.⁹⁴

Kesetaraan gender: keadaan setara dalam status, hak, dan kesempatan, serta dihargai secara setara, tanpa memandang apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan.

Pengarusutamaan gender: melibatkan penilaian dan penanganan dampak terhadap perempuan dan anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di semua tahap intervensi, mulai dari perancangan hingga monitoring dan evaluasi, dan di semua tingkatan, bahkan ketika kesetaraan gender bukan fokus utama intervensi.⁹⁵

Pendekatan responsif gender: diinformasikan melalui analisis dan/atau kesepakatan gender. Kepekaan gender sebagai sebuah konsep dan praktik berupaya untuk memungkinkan kapasitas operasional dan praktis untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengecualian, dan perbedaan gender melalui tindakan atau upaya implementasi yang layak, terpantau, dan dievaluasi.⁹⁶

Intervensi sensitif gender: mengenali kebutuhan dan realitas spesifik laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan peran gender mereka dalam konteks tertentu. Paling tidak, intervensi tersebut harus menghindari berkubu dengan atau memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada. Jika memungkinkan, intervensi tersebut harus berupaya untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara perempuan dan laki-laki, dengan mengambil langkah-langkah untuk mendorong keadilan dan kesetaraan gender.⁹⁷

Rencana aksi nasional berdampak tinggi: rencana aksi nasional yang dihasilkan dari proses inklusif yang menjamin partisipasi penuh dan bermakna dari perempuan dalam proses dan pengambilan keputusan terkait keamanan; mempunyai linimasa (timeline) dan mekanisme akuntabilitas publik; serta mencadangkan pendanaan prioritas. Rencana berdampak besar berpotensi mendorong pemerintah, lembaga multilateral, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan perubahan kebijakan yang terkoordinasi dan dapat ditindaklanjuti serta memberikan hasil yang berkelanjutan.

Keamanan manusia: pandangan keamanan yang berpusat pada masyarakat. Keamanan manusia menekankan keselamatan sehari-hari masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan program untuk memerangi kemiskinan. Keamanan manusia membahas isu-isu utama, seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, masyarakat, pendidikan, dan komunitas. Keamanan manusia tidak hanya melindungi tetapi juga memberdayakan manusia dan masyarakat sebagai sarana keamanan. Dengan berfokus pada individu, model keamanan manusia bertujuan untuk mengatasi keamanan baik laki-laki maupun perempuan secara setara.

Inklusivitas:⁹⁸ menegaskan gagasan bahwa kelompok-kelompok yang beragam di spektrum masyarakat yang luas harus mempunyai suara dalam berbagai proses yang memengaruhi mereka, dengan fokus khusus pada kelompok yang terpinggirkan. Meskipun partisipasi dan keterwakilan merupakan aspek kunci dari inklusi, upaya untuk memastikan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan memperkuat kapasitas komunitas yang terpinggirkan mungkin sama pentingnya dengan mengundang mereka untuk ikut serta dalam diskusi.

Antargenerasi: keterlibatan anggota dari dua generasi atau lebih dalam kegiatan yang dapat membuat mereka mempertimbangkan perspektif (generasi) yang berbeda. Ini artinya meningkatkan interaksi, mengupayakan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan saling belajar

Pelokalan: didefinisikan sebagai peningkatan kepemimpinan nasional, kepemilikan dan komitmen terhadap implementasi komitmen terhadap perempuan, perdamaian, dan keamanan di antara aktor-aktor utama nasional. Pelokalan ini meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin nasional dan otoritas pemerintah, organisasi regional, PBB, donor, dan mitra pembangunan lainnya atas kewajiban mereka berdasarkan resolusi Dewan Keamanan dan kerangka kerja regional masing-masing, seperti Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Instrumen hukum dan kebijakan konkrit yang memperkuat implementasi nasional merupakan elemen penting, di samping koordinasi sistematis dan kerja sama lintas sektoral di antara para pemangku kepentingan.⁹⁹

Perdamaian: artinya tidak hanya tidak adanya konflik kekerasan (perdamaian negatif) namun juga adanya keadilan dan kesetaraan, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dan alam (perdamaian positif).¹⁰⁰

Koherensi kebijakan: konsistensi dan koordinasi tujuan dan aksi di antara berbagai kebijakan nasional dan subnasional bila memungkinkan, atau dalam istilah sederhana, ketika kebijakan “berjalan bersama-sama dalam arah yang sama” alih-alih mencari tujuan yang berlawanan atau berbeda.

Keamanan: keadaan terbebas dari bahaya atau ancaman, yang mencakup ancaman terhadap keamanan manusia seperti bangkitnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan, perdagangan manusia, krisis iklim, krisis kesehatan global, dan lain-lain.

Jenis Kelamin: mengacu pada perbedaan karakteristik biologis dan fisiologis laki-laki dan perempuan.

Kekerasan berbasis gender dan jenis kelamin: Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: “setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan memperdagangkan seksualitas perempuan, dengan menggunakan paksaan, ancaman kekerasan atau kekerasan fisik, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan penyintas, dalam situasi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.” Istilah ini mencakup seks paksa, pemaksaan seksual dan pemerkosaan terhadap laki-laki dan perempuan dewasa dan remaja, serta pelecehan seksual terhadap anak-anak.¹⁻¹

Norma sosial: Harapan bersama dari individu atau kelompok tertentu mengenai bagaimana orang seharusnya berperilaku. Norma berperan sebagai motivasi yang kuat baik untuk mendukung atau menentang sikap atau perilaku individu, terutama karena individu yang menyimpang dari harapan kelompok akan menjadi sasaran rasa malu, sanksi atau ketidaksetujuan oleh orang lain yang penting bagi mereka.¹⁰²

Tokenisme: praktik melakukan upaya simbolis untuk menerapkan praktik inklusif untuk memberikan kesan inklusif dan adil.

Kekerasan: sering dipahami sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian atau kematian. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis.

Agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan: agenda berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan sembilan resolusi berikutnya: 1820 (2008), 1888 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 dan 2122 (2013), 2242 (2015), dan 2467 dan 2493 (2019). Agenda ini menerapkan perspektif gender dalam perdamaian dan keamanan.¹⁰³

References

- ASEAN (Association for Southeast Asian Nations) Secretariat (2021).** ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- (2022). ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Babic-Svetlin, K., et al. (2016).** "Localisation of Women, Peace, and Security Agenda: Case study of six local governments in Bosnia and Herzegovina." Sarajevo: Agency for Gender Equality, Ministry of Human Rights and Refugees, Government of Bosnia and Herzegovina
- CARE (n.d.).** "CARE International Accountability Framework." Website: <https://www.care-international.org/files/files/CARE%20International%20Accountability%20Framework.pdf>.
- Coomaraswamy, R., et al. (2015).** "Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A global study on the implementation of Security Council resolution 1325." New York: UN Women.
- The Dag Hammarskjöld Foundation (2021).** "Realising Inclusivity: The role of the United Nations in promoting inclusion at the country level." Uppsala: The Dag Hammarskjöld Foundation.
- DFID (Department for International Development), Government of the United Kingdom (2015).** "Addressing Violence against Women and Girls: Guidelines part B." London: Department for International Development.
- (2019). "How to' Guidance Note on Gender Equality: A practical guide to integrating gender equality into DFID and HMG policy and programming." London: Department for International Development.
- European Institute for Gender Equality (2021).** "Glossary and Thesaurus." Vilnius: European Institute for Gender Equality.
- Global Coalition on Youth, Peace and Security (2022).** "Implementing the Youth, Peace and Security Agenda at Country-level: A guide for public officials." New York: Office of the UN Secretary-General's Envoy on Youth.
- GNWP (Global Network of Women Peacebuilders) (2017a).** From Best Practice to Standard Practice: A toolkit on the localisation of the UN Security Council resolution 1325 on women and peace and security. New York: Global Network of Women Peacebuilders and UN Women.
- (2017b). No Money, No NAP: Manual for costing and budgeting national action plans on UNSCR 1325. New York: Global Network of Women Peacebuilders.
- Heise, L. L. (2011).** "What Works to Prevent Partner Violence: An evidence overview." STRIVE.
- HM Government (2015).** "Integrating Gender Issues into Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) Programming." London: HM Government.
- IFAD (International Fund for Agricultural Development) (2017).** Increasing Transparency for Greater Accountability – Action Plan. Rome: International Fund for Agricultural Development.
- IGWG (Interagency Gender Working Group) (2002).** "The Gender Integration Continuum." Washington, DC: Interagency Gender Working Group. Website: <https://www.igwg.org/>
- ILO (International Labour Organisation) (n.d.).** "Accountability and Transparency." Website: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/accountability-and-transparency/lang--en/index.htm>.

- Inclusive Security and Women Waging Peace (2004).** Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action. London.
- Jacevic, M. (2019).** "What Makes an Effective WPS National Action Plan?" Australian Strategic Policy Institute.
- (2022). Towards Full Implementation of WPS Agenda in Viet Nam: Report to contribute to the possible development of Viet Nam's first national action plan on women, peace and security. Hanoi: UN Women.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2014).** Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 2014–2019. Website: <http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2020/12/Indonesia-National-Action-Plan.pdf>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Indonesia (2022).** Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Regional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Indonesia.
- Kirby, P., and L. J. Shepherd (2016).** "Reintroducing Women, Peace and Security." *International Affairs* 92(2).
- Lippai, Z., and A. Young (2017).** "Creating National Action Plans: A guide to implementing resolution 1325." Washington, DC: Internal Security.
- Myrntinen, H., et al. (2020).** "Implementing the Women, Peace and Security Agenda in the OSCE Region." Vienna: Organisation for Security and Co-operation in Europe and LSE Centre for Women, Peace and Security.
- Natividad, A. M. (2013).** "Empowerment and Participation." In *Implementing the Philippine National Action Plan on UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: A Civil Society Monitoring Report – March 2010 to January 2013*. Quezon City: WE Act 1325.
- Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, Republic of the Philippines (2017).** National Action Plan on Women, Peace and Security 2017–2022. Pasig City: Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, Republic of the Philippines.
- Office of the Regional Chief Minister (2023).** Bangsamoro Regional Action Plan on Women, Peace and Security 2023–2028. Mindanao: Office of the Regional Chief Minister.
- Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict (2017).** Report of the Secretary-General on Conflict-related Sexual Violence. S/2017/249, eighth annual report. United Nations.
- Peace Women (2012).** Women, Peace and Security Handbook: Compilation and analysis of United Nations Security Council resolution language 2000–2012." New York: Women's International League for Peace and Freedom.
- Perez, J., and B. Orozco. (2013).** "Policies, Mechanisms and Capacity Building for Women in Conflict Areas." In *Implementing the Philippine National Action Plan on UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: A Civil Society Monitoring Report – March 2010 to January 2013*. Quezon City: WE Act 1325.
- Piscano, F. Y. 2013.** "Promotion and Mainstreaming of Gender Perspective in All Aspects of Conflict Prevention, Conflict Resolution and Peacebuilding." In *Implementing the Philippine National Action Plan on UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: A Civil Society Monitoring Report – March 2010 to January 2013*. Quezon City: WE Act 1325.
- Sarajevo Open Centre, OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe) and SIDA (Swedish International Development Agency) (2020).** "What Is the Gender of Security? 20 years of the Security Council resolution 1325 'women, peace and security' and its implementation in Bosnia and Herzegovina." Sarajevo.

- United Nations (2017).** "Annex to the Letter Dated 1 March 2018 from the Permanent Representatives of Germany, Namibia and Spain to the United Nations Addressed to the Secretary-General." A/72/782-S/2018/178. New York: United Nations.
- UN Women (n.d.).** "Asia-Pacific Regional Symposium National Action Plans on Women, Peace and Security," UN Women Regional Office for Asia and the Pacific.
- UN Women (2012).** "Women and Peace and Security: Guidelines for national implementation." New York: UN Women.
- UN Women (2018).** "Report of the Expert Group Meeting on Women's Meaningful Participation in Negotiating Peace and the Implementation of Peace Agreements." New York: UN Women.
- UN Women (2021).** "Corporate Evaluation of UN Women's Support to National Action Plans on Women, Peace and Security." New York: UN Women.
- UN Women (2023).** "Women, Peace and Security in Indonesia – Country Brief." Jakarta: UN Women.
- USAID (United States Agency for International Development) (n.d.).** "Localisation: Catalysing and Supporting Local Change." Website: <https://www.usaid.gov/localisation>.
- **(2022).** "Localisation at USAID: The Vision and Approach." Washington, DC: United States Agency for International Development.
- Veneracion-Rallonza, M. L. (2013).** "Services and Programs for Women in Conflict-Affected Areas." In Implementing the Philippine National Action Plan on UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: A Civil Society Monitoring Report – March 2010 to January 2013. Quezon City: WE Act 1325.
- WIIS (Women in International Security) (2020).** "1325 and Beyond: Winning essays." Washington, DC: Women In International Security.
- WILPF (Women's International League for Peace and Freedom) (n.d.).** "National Action Plans at a Glance." Website: <http://1325naps.peacewomen.org/>.

-
- 1 Babic-Svetlin et al., 2016.
 - 2
 - 3 ASEAN Secretariat, 2021.
Resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 and 2122 (2013), 2241 (2015), and 2467 and 2493 (2019).
 - 4 UN Women, n.d.
 - 5 WIIS, 2020.
 - 6 Ibid.
 - 7 UN Women, n.d.
 - 8 Jacevic, 2022.
 - 9 UN Women, 2012.
 - 10 USAID, n.d.
 - 11 GNWP, 2018a.
 - 12 ASEAN Secretariat, 2022.
 - 13 Jacevic, 2022.
 - 14 ASEAN Secretariat, 2022.
 - 15 Ibid.
 - 16 Ibid.
 - 17 Ibid.
 - 18 Sarajevo Open Centre, OSCE and SIDA, 2020.
 - 19 ASEAN Secretariat, 2022.
 - 20 Ibid.
 - 21 GNWP, 2017a.
 - 22 UN Women, 2012.
 - 23 Ibid.
 - 24 ASEAN Secretariat, 2022, p. 44.
 - 25 Ibid.
 - 26 UN Women, 2012.
 - 27 ASEAN Secretariat, 2022, p. 13.
 - 28 Coomaraswamy et al., 2015.
 - 29 Ibid.
 - 30 UN Women, 2012.
 - 31 Ibid.
 - 32 Jacevic, 2022.
 - 33 Mereka mencakup perwakilan dari kementerian, lembaga, dan departemen yang terlibat dalam memajukan isu-isu terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan; masyarakat sipil; Organisasi berbasis agama, termasuk para pemimpin adat; Organisasi berbasis komunitas yang dipimpin oleh aktivis perempuan; sektor swasta; akademisi; media dan lain-lain.
 - 34 Jacevic, 2022.
 - 35 Diadaptasi dari GNWP, 2017a.
 - 36 Diadaptasi dari the Global Coalition on Youth, Peace, and Security, 2022.
 - 37 Ibid.
 - 38 Ibid.
 - 39 Ibid.
 - 40 Ibid.
 - 41 Ibid.

- 42 Ibid.
- 43 Ibid.
- 44 Ibid.
- 45 Lippai and Young, 2017.
- 46 Jacevic, 2022.
- 47 Berdasarkan Studi Global PBB tentang Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, elemen kunci yang menciptakan rencana aksi nasional berdampak tinggi adalah proses rancangan yang inklusif dan sistem koordinasi yang mapan untuk implementasi, kemauan politik yang kuat dan berkelanjutan, sumber daya implementasi yang diidentifikasi dan dialokasikan, serta rencana monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Lihat Coomaraswamy et al., 2015.
- 48 Ibid.
- 49 Ibid.
- 50 Inisiatif ini berasal dari komitmen yang dibuat oleh Spanyol selama peninjauan tingkat tinggi terhadap implementasi resolusi Dewan Keamanan 1325.
- 51 United Nations, 2017.
- 52 Hasil survei terhadap anggota Komite ASEAN untuk Perempuan yang dilakukan pada Agustus 2023 pada saat penyusunan toolkit ini.
- 53 ASEAN Secretariat, 2021.
- 54 Jacevic, 2022.
- 55 Diadaptasi dari Lippai and Young, 2017. Masyarakat sipil menggambarkan beragam aktor, termasuk anggota media, akademisi, NGO yang berorientasi pada perdamaian, dan organisasi yang fokus secara khusus dan eksplisit pada perempuan dan anak perempuan. Ada yang menjadi pelaksana, ada yang menjadi advokat, dan ada pula yang keduanya. Pemilihan Organisasi Masyarakat Sipil harus didasarkan pada jangkauan yang luas untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi yang dipilih benar-benar mewakili pemangku kepentingan yang menjadi sasaran di negara tersebut.
- 56 Inclusive Security and Women Waging Peace, 2004.
- 57 Jacevic, 2022.
- 58 UN Women, 2021.
- 59 Untuk panduan rinci mengenai identifikasi isu gender dalam penilaian konteks situasi yang terkena dampak konflik, kunjungi situs berikut: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/10/WPSsourcebook-03B-WomensPeaceSecurityPriorities-en.pdf> and https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Media/Publications/UNIFEM/0201_GenderAndConflictAnalysis_en.pdf
- 60 UN Women, 2012.
- 61 Hasil 1 dari pilar 1 tentang perlindungan mempunyai tiga keluaran dengan 24 aksi prioritas; hasil 2 pilar 2 tentang partisipasi mempunyai empat keluaran dengan 25 aksi prioritas; hasil 3 dan hasil 4 dari pilar 3 tentang pencegahan mempunyai empat keluaran dengan 17 aksi prioritas, dan hasil 5 dari pilar 4 tentang bantuan dan pemulihan mempunyai tiga keluaran dengan 20 aksi prioritas.
- 62 Setiap aksi prioritas harus dirancang dan diimplementasikan untuk memahami dan merespons beragam kapasitas dan kebutuhan semua perempuan dan anak perempuan, dan untuk mendorong partisipasi penuh dan inklusi mereka dalam perdamaian dan keamanan di semua tahap.
- 63 CARE, n.d.
- 64 Lippai and Young, 2017.
- 65 IFAD, 2017.
- 66 Diadaptasi dari ILO, n.d.
- 67 Diadaptasi dari Myrtilinen et al., 2020.
- 68 Jacevic, 2022.
- 69 Ibid.

70 Ibid. Ketika dikembangkan melalui proses konsultatif, dan didukung oleh kemauan politik dan keterlibatan internasional, pendekatan ini terbukti tidak hanya menghasilkan dokumen yang lebih baik namun juga membangun arsitektur yang kuat untuk rencana aksi nasional, yang pada gilirannya memfasilitasi implementasi yang efektif dan efisien.

71 Ibid.

72 GNWP, 2017b.

73 Ibid.

74 Ibid.

75 Ibid.

76 Ibid.

77 Ibid.

78 Ibid.

79 Potensi pendanaan dari obligasi berdampak sosial dan pembangunan yang memanfaatkan modal swasta untuk mendanai proyek-proyek sosial yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk yang terkait dengan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta instrumen keuangan Islam seperti sukuk

80 ASEAN Secretariat, 2022.

81 Ibid.

82 Ibid.

83 Di beberapa negara, peninjauan belum dilakukan.

84 ASEAN Secretariat, 2022.

85 Ibid.

86 UN Women, 2012.

87 Jacevic, 2019.

88 UN Women, 2021.

89 Global Coalition on Youth, Peace, and Security, 2022.

90 Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, 2017; DFID, 2015.

91 DFID, 2019.

92 UN Women, 2018.

93 DFID (2015), "Addressing Violence against Women and Girls, guideline's part B", Department for International Development, London, U.K.

94 HM Government, 2015.

95 IGWG, 2002.

96 UN Women, 2018.

97 IGWG, 2002.

98 The Dag Hammarskjöld Foundation, 2021.

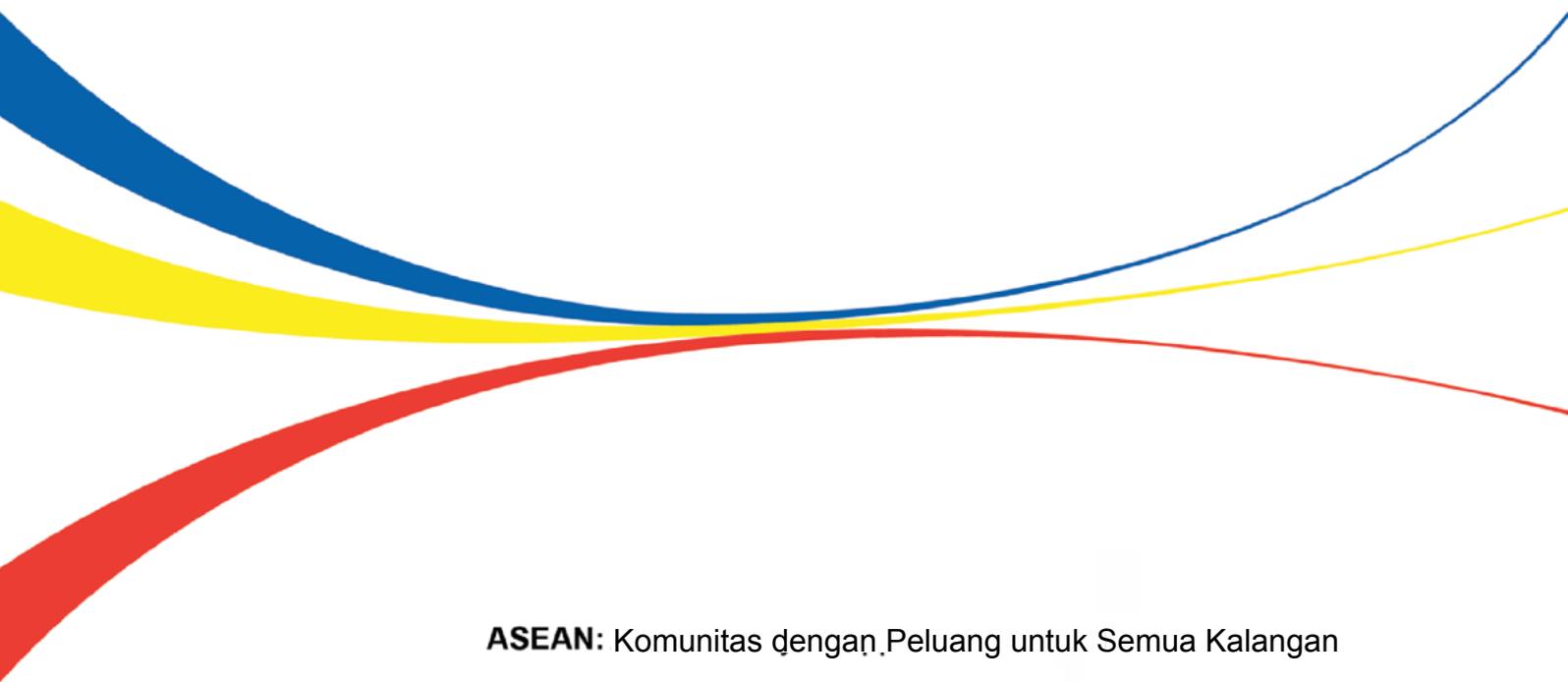
99 GNWP, 2017a.

100 Global Coalition on Youth, Peace, and Security, 2022.

101 DFID, 2015.

102 Heise, 2011.

103 Peace Women, 2012.



ASEAN: Komunitas dengan Peluang untuk Semua Kalangan

ISBN 978-623-5429-33-5 (PDF)



9 786235 429335